

EDITORIAL

Menunggu Bukti Aksi Purbaya

BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak. Keduanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan, perlindungan sosial, hingga stabilitas fiskal yang telah disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).



DUTA

Setiap celah kebocoran yang dibiarkan, sekecil apa pun, pada akhirnya akan berujung pada melemahnya kapasitas negara dalam menjalankan kewajiban kepada rakyat. Karena itu, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak patut diapresiasi.

Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi oleh praktik menyimpang di tubuh institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara itu. Langkah tegas tersebut juga relevan di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks. Tekanan global, ketidakpastian perdagangan, hingga kebutuhan pembiayaan dalam negeri menuntut penerimaan negara yang kuat dan kredibel.

Apalagi, target penerimaan pajak 2026 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun, di luar penerimaan cukai. Target tersebut naik 22,9% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2025. Dengan demikian, perlu upaya ekstra dan strategi yang lebih presisi.

Pembenahan internal setidaknya akan membenahi kebocoran, meskipun ancaman *shortfall* penerimaan pajak masih bisa datang dari faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Selama ini, rasanya ada yang salah dengan sistem pengawasan dan budaya organisasi. Digitalisasi yang dijalankan terbukti belum cukup untuk mengalahkan mentalitas aparat yang korup.

Purbaya juga perlu diingatkan bahwa ancaman saja tidak cukup. Reformasi birokrasi di sektor fiskal terlalu sering berhenti pada pernyataan keras tanpa eksekusi yang konsisten.

Jika langkah bersih-bersih ini hanya menjadi narasi, efek jera yang diharapkan pun tak akan pernah tercapai. Justru yang tumbuh ialah sikap permisif baru bahwa ancaman bisa dinegosiasikan dan pelanggaran bisa ditoleransi.

Karena itu, realisasi menjadi kunci. Pemeriksaan internal harus dilakukan secara menyeluruh dan berani menyentuh posisi strategis, bukan hanya pegawai lapis bawah.

Pejabat yang terbukti membuka celah kebocoran penerimaan negara harus dicopot tanpa ragu, disertai mekanisme penegakan hukum yang transparan. Tanpa itu, pesan ketegasan akan kehilangan makna.

Wajib pajak dan pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah yang mereka setorkan kepada negara dikelola oleh sistem yang bersih dan adil. Ketika aparat di garda depan fiskal justru dipersiapkan bermasalah, kepatuhan akan melemah dan legitimasi negara ikut tergerus.

Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut retorika. Yang dibutuhkan ialah keberanian untuk mengeksekusi ancaman menjadi tindakan nyata. Sebaliknya, jika kembali berhenti di wacana, yang bocor bukan hanya penerimaan, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara.

Silakan tanggapi melalui:
www.mediaindonesia.com dan
www.metrotvnews.com
Simak tayangannya di:
www.mediaindonesia.com/editorials

“Nyatanya, saat terpojok, Noel cuma bisa mengekor para koruptor ‘senior’ yang kerap menggunakan tuduhan kriminalisasi untuk ngeles atau membela diri dari kesalahan.”

Podium | Hlm 2

Komisi III memandang perlu dilakukan penggantian terhadap calon hakim konstitusi (Inosentius Samsul) untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR.”

Habiburokman
Ketua Komisi III DP



Selekta | Hlm 2

SENO



ANTARA/IGGOY EL FITRA

KELAS DARURAT: Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar di dalam tenda, di SDN 14 Labuah, Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatra Barat, kemarin. Sedikitnya 79 siswa belajar di dalam tenda dan kelas darurat dengan bangunan tripleks karena mereka rusak akibat bencana, sambil menunggu pembangunan sekolah sementara dari Muhammadiyah Disaster Management Center bersama Kemendikdasmen. Sekolah di Lokasi Bencana Diutamakan | Halaman 10

Purbaya Tebar Ancaman

- **Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.**
- **Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dipertanyakan.**
- **Perlu ada mekanisme mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak.**

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

MENTERI Keuangan (Menkeu) menyatakan akan merotasi pejabat di lingkungan kepastian dan pajak sebagai bagian dari langkah menutup celah kebocoran negara. Sebagian bahkan akan dirumahkan.

Perombakan dilakukan secara menyeluruh dimulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepala kantor wilayah, hingga pimpinan pelabuhan yang mengawasi aktivitas kepastian.

“Selain direktur jenderal (dirjen), pejabat di sekelilingnya saya tukar semua. Kepala pelabuhan dan kanwil yang mengawasi pelabuhan juga saya ganti. Sebagian saya rumahkan,” tegas Purbaya di sela acara Indonesia Fiscal Forum di Jakarta, kemarin.

BUKAN KEWENANGAN MENKEU

Menkeu dinilai akan menghadapi hambatan dalam merombak pejabat, terutama untuk jabatan eselon I dan II. Pengamat perpajakan Ronny Bako mengingatkan mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian pejabat eselon

I berada di tangan presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Kemudian, untuk jabatan di bawah eselon II, kewenangan berada pada Kemaman-Rebri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Jadi, tidak bisa main ganti pejabat,” ujar Ronny.

PENGAWASAN LEMAH

Lebih jauh, Ronny menilai mengganti pegawai bukan solusi instan untuk memperbaiki sistem. Akar persoalan justru berada pada lemahnya pengawasan internal serta belum optimalnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Perlu ada pengawasan yang lebih ketat,” tandasnya.

Ronny pun mengusulkan perlu ada pihak ketiga berupa konsultan kepegawaian independen untuk melakukan pengujian ulang terhadap pegawai Bea dan Cukai secara berkelanjutan.

ROTASI TIAP TAHUN

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai tanpa pembenahan akar persoalan, seperti praktik informal dan lemahnya kontrol internal, kebocoran berisiko tetap terjadi meskipun pejabat diganti.

Ariyo menyarankan reformasi struktural, antara lain dengan menerapkan rotasi jabatan yang intensif dan acak. Hal itu terutama pada posisi-posisi sensitif yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

“Rotasi setiap 1-2 tahun perlu dilakukan, termasuk di kantor wilayah dan pelabuhan, untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak,” kata Ariyo kepada *Media Indonesia*.

SIKAT PARA BEKING

Selain perombakan pejabat, Purbaya menyatakan menggandeng Menteri

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamarri Chaniago untuk mengatasi beking yang menghambat serapan penerimaan negara.

Sebagai langkah awal, strategi itu akan dilakukan terhadap aktivitas ekonomi rokok ilegal. “Kami akan melibatkan polisi, tentara, dan lain-lain supaya beking itu kabur. Utamanya kami kejar di rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan akan jalan itu,” tandas Menkeu.

Sebagai catatan, pada 2025, penerimaan negara dari perpajakan meleset dari target, yakni kurang Rp271,7 triliun atau hanya terpenuhi 87,6% sebesar Rp1.917,6 triliun. (Ant/X-5)

Bersih-Bersih 5 Pelabuhan ala Purbaya

- Mulai dilakukan pada Rabu, 28 Januari 2026.
- Sejumlah pejabat akan dirumahkan dan dicopot karena dinilai berkinerja tidak optimal.

Tujuan dan Fokus Penataan

- Untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.
- Guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik.
- Fokus penataan pada Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak.
- Mengganti seluruh pejabat Bea Cukai di 5 pelabuhan besar.

Skema Penggantian

- Melalui rotasi dan promosi internal.
- Pejabat yang dicopot akan digantikan oleh pegawai yang lebih muda, dan sebagian lainnya dinonaktifkan sementara.

5 Pelabuhan Besar yang Terdampak

- Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelabuhan kontainer terbesar di Indonesia.
- Tanjung Emas, Semarang, pelabuhan utama di Jawa Tengah.
- Tanjung Perak, Surabaya, pelabuhan utama di Jawa Timur.
- Batu Ampar, Batam, pelabuhan penting di Kepulauan Riau.
- Belawan, Medan, pelabuhan utama di Sumatra Utara.

Sumber: Kemenkeu/Litbang MI



KUOTA 2026

Pertalite, Solar Dipangkas, Minyak Tanah Naik

BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2026. Pemangkasan terbesar menyangkut kuota untuk pertalite, yakni turun 6,28%. Selain itu, kuota solar bersubsidi dikurangi 1,32% jika dibandingkan dengan kuota 2025.

Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Wahyudi memaparkan kuota pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kiloliter (kl), berkurang ketimbang di 2025 yang

mencapai 31.230.017 kl. Demikian pula dengan kuota solar subsidi yang sebesar 18.636.500 kl, atau turun dari 18.885.000 kl di 2025.

Pemangkasan itu didasarkan pada realisasi di 2025 yang lebih rendah daripada kuota. “BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” ujar Wahyudi.

BPH Migas mencatat realisasi penyaluran pertalite tahun lalu sebesar 28,06 juta kl atau 89,86% dari kuota. Lalu, pe-

nyaluran solar subsidi sebesar 18,41 juta kl atau 97,49% dari kuota.

Namun, perlakuan berbeda diberikan terhadap BBM bersubsidi jenis minyak tanah. Kendati penyaluran minyak tanah sebesar 507,9 ribu kl atau sebesar 96,75% dari kuota 525 ribu kl, kuota untuk 2026 justru dinaikkan menjadi 526 ribu kl.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai, pemangkasan kuota pertalite dan solar tersebut tidak serta-merta akan memukul kelompok rentan. Itu dengan syarat penyaluran benar-benar dijalankan secara tepat sasaran.

Hadi menekankan, selama ini konsumsi BBM bersubsidi kerap tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok sasaran, melainkan bocor ke kelompok menengah atas. Pengetatan kuota dinilai sebagai instrumen untuk menutup celah tersebut. “Subsidi tepat sasaran ini perlu didukung oleh semua *stakeholder*,” ujarnya.

Hadi mengingatkan pemerintah tetap perlu memastikan kesiapan sistem pendataan dan pengawasan agar pengetatan kuota tidak menimbulkan efek psikologis di masyarakat, seperti kekhawatiran kelangkaan atau lonjakan harga di tingkat ritel. (Ant/Ata/X-5)

Waspada! Respons Negatif Investor

Investor khawatir, di bawah jajaran pimpinan yang baru, BI kurang berkomitmen menjaga inflasi. Nilai tukar rupiah berpeluang melemah, dekati rekor terendah 16.985 per US\$.

Ekonomi | Hlm 5

PODIUM

Noel agak Laen



Ahmad Punto
Dewan Redaksi Media Group

IMANUEL 'Noel' Ebenezer memang bukan sembarang terdakwa korupsi. Kalau boleh meminjam judul film besutan sutradara Muhadkly Aho yang sekuel keduanya baru saja memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, Noel seperti itu, *Agak Laen*.

Dulunya ia seorang aktivis. Sebagai aktivis, tentu ia selalu paling depan dalam menyoroti sekaligus mengingatkan perihal integritas serta nurani pejabat dan penguasa. Tidak terkecuali soal korupsi. Noel sangat vokal menyuarakan narasi antikorupsi, bahkan pernah mengusulkan hukuman mati bagi koruptor.

Lalu, roda berputar. Sang aktivis itu, singkat cerita, masuk lingkaran elite penguasa. Setapak demi setapak ia menaiki tangga kekuasaan. Puncaknya ia masuk radar Presiden Prabowo Subianto dan ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan.

Idealisme aktivisnya seketika tenggelam. Ia tercebur dalam kolam pragmatisme kekuasaan. Noel yang dulu getol menyoal perilaku korup para pejabat, setelah jadi wamen, malah menjadi pelakunya. Ia bahkan jadi anggota pertama Kabinet Merah Putih yang ditangkap tangan oleh KPK. Saat itu, usia jabatannya belum genap satu tahun. 'Agak laen', bukan?

Namun, tak berhenti di situ. Ia semakin memperlihatkan sisi 'agak <i>i-laen' yang ia punya saat persidangan atas perkaranya mulai digelar. Dari sidang satu ke sidang berikutnya, ia menampilkan wajah dan watak yang berlainan. Entahlah, itu bagian dari strategi atau memang cerminan karakter asli dia yang gampang berubah haluan.

Pada sidang perdana, Senin (19/1), ia tampil dengan wajah pertobatan yang nyaris sempurna. Di sela-sela sidang, kepada wartawan ia mengamini telah menerima uang sebesar Rp3 miliar dalam kasus pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemenaker. Pada sidang itu, jaksa mendakwa Noel menerima gratifikasi senilai Rp3,36 miliar serta satu sepeda motor Ducati Scrambler dari ASN Kemenaker dan pihak swasta.

Dengan muka pasrah, eks Ketua Relawan Jokowi Mania itu mengakui cukup puas atas dakwaan jaksa. Ia pun mengakui bersalah sehingga tidak akan menyampaikan pembelaan. "Sudah mengakui salah, kok, *ngapain* lagi pakai eksepsi (pembelaan)? Sudah betul semualah, *ngapain* lagi kita ribet-ribet, sih. Biar semua terang benderang," kata Noel ketika itu.

Namun, hanya berselang tujuh hari, 'keinsafan' Noel itu menguap tanpa sisa. Begitu keluar dari ruangan sesuai menjalaninya sidang kedua, Senin (26/1), ia mendadak lupa pada pengakuan dosanya. Di depan wartawan, ia berbalik 'menyerang' KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadapnya.

Katanya, KPK hanyalah sekumpulan kreator konten di Gedung Merah Putih yang sedang menjahit rekayasa demi pesanan elite yang merasa terganggu oleh sidak-sidak heroiknya. Noel pun memelesetkan kepanjangan OTT dengan 'operasi tipu-tipu'. Pendeknya, ia seolah ingin mencoba menggeser perkara korupsi personal menjadi narasi kriminalisasi politik.

Mulai terkonfirmasi, kan, kenapa dia 'agak laen'? Kalau sebelumnya ia sudah mengakui bersalah, bahkan tak menampik menerima uang miliaran plus sepeda motor dari perkara itu, kenapa seminggu kemudian ia malah menuding ada rekayasa?

Secara logika awam pun, tak masuk. Katanya kriminalisasi, tapi kok, dia terima cuan? Jika proses hukum itu cuma tipu-tipu, lantas Rp3 miliar yang ia akui masuk kantongnya itu uang apa? Apakah itu pembagian honor dari hasil rekayasa para kreator konten di KPK seperti sindirannya kepada lembaga antirasuah itu? Betul-betul 'agak laen', memang.

Ketika di suatu waktu seseorang mengakui kesalahannya, tapi di waktu yang lain ia berteriak sebagai korban fitnah, rekayasa, atau apa pun istilahnya, itu jelas bukan kriminalisasi. Ketika orang merasa dizalimi hanya karena hukum memintanya mempertanggungjawabkan uang yang sudah ia akui masuk sakunya, itu bukan operasi tipu-tipu. Itu merupakan penghinaan terhadap inteligensi publik.

Sesungguhnya publik tidak sebodoh yang ia sangka. Publik tahu, dengan latar belakangnya sebagai aktivis, Noel ialah seorang orator ulung. Ia mahir mengolah kata, piawai menyusun narasi, pintar membangun opini. Gampang bagi dia untuk memelesetkan OTT menjadi apa pun yang ia suka. Namun, publik juga amat paham, uang sebesar Rp3 miliar dan motor Ducati yang ia nikmati ialah fakta keras yang tak bisa ditipu-tipu dengan diksi apa pun.

Justru Noel yang mungkin sebetulnya tidak secerdas yang ia sendiri kira. Nyatanya, saat terpojok, Noel cuma bisa mengekor para koruptor 'senior' yang kerap menggunakan tuduhan kriminalisasi untuk *ngeles* atau membela diri dari kesalahan mereka. Boleh saja saat jadi aktivis Noel ialah 'pemburu koruptor', tapi kini ia hanyalah 'pengekor koruptor'.

Akan tetapi, apa pun yang keluar dari mulut Noel, itu hak dia. Begitu juga publik punya hak untuk tidak mendengar, menikmati, atau bahkan mencemooh ocehan itu. Kita tunggu sambil cermati saja jalannya persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Noel dan kawan-kawannya itu untuk mengetahui fakta hukum yang ada.

Kalau fakta hukumnya sudah terang benderang, buktinya tidak terbantahkan, eh, dia masih *ngocoh* juga, tuding sana tuding sini, serang kanan serang kiri, *maklumin* saja. Memang 'agak laen' dia. Barangkali Muhadkly Aho perlu juga pertimbangan untuk mengajak Noel dalam proyek film *Agak Laen* 3.



ANTARA/DHEMAS REVIVANTO

DPR SETUJUI ADIES KADIR JADI HAKIM MK: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR Adies Kadir (tengah) menerima ucapan selamat dari anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna ke-12 DPR masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat paripurna DPR menyetujui Adies Kadir yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPR menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang akan pensiun pada 5 Februari mendatang.

MKMK Pastikan Jaga MK

- **Pemilihan hakim MK yang tertutup patut dipertanyakan.**
- **DPR yakin Adies Kadir jaga integritas sebagai hakim MK.**
- **Inosentius Samsul disebut mendapatkan tugas lain.**
- **Seleksi hakim MK tidak transparan dan elitis.**

Ketua Mahkamah Konstitusi Adies Kadir

Tanggal Lahir: 17 Oktober 1968 di Balikpapan, Kalimantan (57 tahun).

Sepak Terjang Karier

- Petinggi partai: Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar (2019-2024).
- DPR RI (2014-Sekarang):
 - Anggota legislatif sejak 2014 mewakili dapil Jawa Timur I.
 - Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.
 - Pimpinan DPR: Wakil Ketua DPR (2024-2029) bidang ekonomi dan keuangan.

Mekanisme Pengusulan Hakim MK

- Hakim MK diusulkan oleh tiga lembaga negara (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung).
- Setiap lembaga mengusulkan tiga calon.

Susunan Hakim MK saat Ini (Per 2026)

Di usulkan oleh Presiden	Di usulkan oleh DPR RI
1. Saldi Isra, Wakil Ketua	1. M Guntur Hamzah
2. Enny Nurbaningsih	2. Arsul Sani
3. Daniel Yusnick Pancastaki Foekh	3. Arief Hidayat
Di usulkan oleh Mahkamah Agung (MA)	Pensiun pada 3 Februari 2026, dan awalnya akan digantikan oleh Inosentius Samsul.
1. Anwar Usman	
2. Ridwan Mansyur	
3. Suhartoyo-Ketua MK	

- **20 Agustus 2025:** Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi hakim MK.
- **21 Agustus 2025:** Rapat paripurna DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi hakim MK.
- **26 Januari 2026:** Komisi III DPR memilih Adies Kadir sebagai calon hakim MK usulan DPR menggantikan Inosentius Samsul.
- **27 Januari 2026:** Rapat paripurna DPR menetapkan Adies Kadir sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Sumber: DPR/Antara/Litbang MI

DEVI HARAHAP

devi@mediaindonesia.com

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memastikan akan menjaga independensi MK di tengah kekhawatiran politisasi dalam pencalonan hakim konstitusi.

"Pasti. Untuk itulah, MKMK diadakan," ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, lanjutnya, MKMK belum berada di posisi untuk merespons terkait dengan pemilihan Adies. "Itu belum menjadi urusan MKMK," katanya.

Namun, secara pribadi dan akademik, Palguna menilai proses pemilihan calon hakim MK yang tertutup patut dipertanyakan secara serius. "Sebagai orang akademik, saya harus mempertanyakan dengan sangat serius, beginikah cara merekrut calon negarawan yang jujur, tidak tercela, menguasai dan ketatanegaraan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945?" tegasnya.

Rapat Paripurna DPR, kemarin, mengesahkan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi terpilih. DPR juga menerima surat dari DPP Partai Golkar terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan DPR dari Adies Kadir ke Sari Yulianti.

JAGA KREDIBILITAS

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa ya-

kin Adies Kadir mampu menjaga kredibilitas dan integritas semasa menjabat sebagai hakim konstitusi.

Menurut Saan, DPR memutuskan untuk mengajukan Adies Kadir karena menyanggah gelar profesor dan doktor di bidang hukum. Selain itu, Adies berpengalaman semasa mengisi komisi urusan hukum di DPR sejak 2014. "Saya yakin Adies sangat memadai untuk menjadi hakim konstitusi," kata Saan.

Sementara itu, dalam rapat paripurna pada 21 Agustus 2025, DPR sebenarnya sudah menyetujui Inosentius Samsul menjadi hakim MK setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III. Inosentius yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR menjadi calon tunggal yang diusulkan oleh Komisi III dengan mekanisme penjuragan aktif.

Pemilihan oleh DPR diperuntukkan menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki purnatugas karena berusia 70 tahun pada 3 Februari 2026.

TUGAS LAIN

Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman membenarkan pemilihan

Adies Kadir menggantikan posisi Inosentius Samsul. Menurut dia, pergantian itu dilakukan demi menjaga kepentingan konstitusional lembaga DPR dan upaya memperkuat muruah MK agar kembali pada fungsi hakikinya. Selain itu, lanjutnya, Inosentius Samsul akan mendapatkan penugasan lain.

"Komisi III memandang perlu dilakukan penggantian terhadap calon hakim konstitusi (Inosentius Samsul) untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR. Kami menilai sangat penting adanya sosok hakim yang memiliki pemahaman hukum komprehensif serta rekam jejak cemerlang," ujar Habiburrokhman.

Dia memaparkan keputusan memilih Adies Kadir diambil setelah mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi. Adies dinilai sebagai sosok yang mampu menjadi pilar penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

"Berdasarkan pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat, Komisi III DPR memutuskan menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konsti-

tusi usulan DPR," tegasnya.

Habiburrokhman mengatakan proses seleksi dilakukan secara selektif untuk menghasilkan hakim yang memiliki kapasitas tinggi, profesional, dan kredibel.

POLITIK TRANSAKSIONAL

Pakar hukum tata negara yang pernah menjadi staf ahli MK Refly Harun menilai perubahan calon hakim MK secara mendadak dari Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir menunjukkan proses seleksi yang tidak transparan dan elitis.

"Jelas ini ialah bentuk kuatnya praktik politik transaksional di DPR. Mereka memilih perwakilan hakim MK dengan cara memilih teman," kata Refly.

Menurut Refly, hakim konstitusi seharusnya diisi oleh figur yang telah melepaskan diri dari kepentingan politik praktis. "Hakim MK itu harusnya negarawan, dalam tanda kutip orang yang sudah selesai dengan dirinya, tidak berpihak pada satu golongan atau satu kekuatan, tapi netral dan independen," ujarnya. (Faj/X-4)

Seusai Pencabutan Izin, Danantara Kelola Kawasan

SIMPANG siur perihal pencabutan izin usaha korporasi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai menampakkan titik terang. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut izin usaha sebanyak 28 korporasi sesuai dengan perintah Presiden.

Juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengungkapkan keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi yang dihadiri Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala BPKP, hingga jajaran menteri terkait pada Senin (26/1). "Pencabutan

perizinan berusaha sebanyak 28 subjek hukum korporasi itu ialah hasil investigasi yang membuktikan adanya pelanggaran administratif dan/atau tindak pidana yang didukung fakta serta bukti kuat," ujar Barita pada konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Dari total 28 korporasi yang ditindak, perincian pencabutan izin dilakukan oleh lintas instansi, yakni 22 korporasi oleh Kementerian Kehutanan, dua korporasi oleh Kementerian ESDM, tiga korporasi oleh Kementerian Pertanian, dan satu korporasi oleh Pemerintah Provinsi

Aceh.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Satgas PKH akan segera melakukan penguasaan kembali atas lahan-lahan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Barita menjelaskan selanjutnya pengelolaan lahan dan aset 28 korporasi itu diberikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama BPI Danantara. Secara implisit, keputusan itu mengisyaratkan bahwa tugas pemulihan lingkungan di kawasan itu kini ada di tangan Danantara.

“ Kalau izinnnya dicabut, pertanyaan kuncinya siapa yang mengelola setelah itu? Kalau tidak ada yang mengelola, jangan berharap ada pemulihan lingkungan.”

Dodik Ridho Nurrochmat, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

JANGAN TIDAK DIKELOLA

Di tempat terpisah, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University Dodik Ridho Nurrochmat secara tidak langsung sepakat bahwa pencabutan izin tersebut mesti diikuti dengan kejelasan pengelolaan lanjutan. Hal itu bertujuan tidak berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan dan mempercepat kerusakan lingkungan alih-alih memulihkannya.

Ia menjelaskan bahwa kekoson-

gan pengelolaan membuka ruang bagi praktik-praktik ilegal dan konflik kepentingan di lapangan. Tanpa otoritas yang jelas, kawasan bekas konsesi rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Kondisi seperti itu membuka peluang *free rider*, penumpang gelap yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa kewajiban memulihkan atau menjaga," kata Dodik

dalam rapat dengan Komisi IV DPR, kemarin.

Ia menilai negara kerap berhenti pada keputusan administratif tanpa memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang. "Kalau izinnnya dicabut, pertanyaan kuncinya siapa yang mengelola setelah itu? Kalau tidak ada yang mengelola, jangan berharap ada pemulihan lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi LBH Padang Adrizal pernah mengingatkan agar lahan bekas konsesi yang dicabut tidak dialihkan ke entitas bisnis lain. Ia khawatir ada praktik ganti pemain, yakni izin yang dicabut dari swasta diberikan kepada BUMN atau instansi yang dekat dengan kekuasaan. "Itu justru akan menambah potensi kerusakan dan mempersempit ruang hidup rakyat," tegasnya, pekan lalu. (Faj/Ata/X-3)



Jangan Terpengaruh Manuver Terdakwa

Kejagung Bidik Aset Jurist Tan



M/USMAN ISKANDAR

HADIRKAN TUJUH SAKSI: Terdakwa Mendikbud-Ristek 2019-2022 Nadiem Makarim digiring petugas sesuai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu. Dalam sidang Senin (26/1), jaksa menghadirkan tujuh saksi, di antaranya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen dan Strategic Partner Manager Google for Education.

- **Jaksa diminta tidak terpengaruh oleh manuver Nadiem yang dianggap mencederai kemerdekaan saksi.**
- **Pengacara Nadiem melaporkan dua saksi ke KPK atas tuduhan menerima gratifikasi.**
- **Saksi mengaku menerima US\$30 ribu dan Rp450 juta dari rekanan vendor pengadaan Chromebook.**

RAHMATUL FAJRI
rahfaj@mediaindonesia.com

KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan tim jaksa agar tetap tegak lurus pada substansi perkara dan tidak terdistraksi oleh upaya-upaya di luar persidangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Boyamin menegaskan tugas utama jaksa saat ini ialah membuktikan adanya niat jahat dan persekongkolan yang telah dirancang Nadiem Makarim sejak awal proses pengadaan. "Jaksa harus menunjukkan kepada

hakim dan publik bahwa ada dugaan pengaturan sejak awal. Pengadaan rata-rata dikunci untuk memenangkan 'jago' yang dibawa, baik melalui syarat, spesifikasi, hingga administrasi yang sengaja dibuat kaku," ujar Boyamin melalui keterangannya, kemarin.

Dalam menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan sejumlah saksi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.

Ia meminta jaksa tidak terpengaruh oleh manuver-manuver Nadiem yang dianggap tidak substansial dan cenderung mencederai kemerdekaan saksi dalam memberikan keterangan. "Jaksa jangan mengikuti irama terdakwa terkait hal-hal yang tidak

substansial," katanya.

TERIMA GRATIFIKASI

Kuasa hukum eks Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Ari Yusuf, mengaku telah melaporkan dua saksi sidang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke KPK atas tuduhan menerima gratifikasi.

Hal itu disampaikan Ari di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi, Senin (26/1).

"Sesuai dengan komitmen kami, karena saksi-saksi kemarin mencoba untuk berbelit-belit dalam keterangan mereka, kami telah melaporkan itu ke KPK. Itu surat laporannya sudah kami masukkan," ujar Ari dalam sidang. Namun, Ari tidak menyebutkan secara jelas siapa saja saksi yang dilaporkannya.

Sebelumnya, Ari pernah menyebut tiga saksi yang potensial dilaporkan, yakni mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kemendikbud Jumeri dan Hamid Muhammad serta mantan Sekretaris Ditjen Paudasmen Sutanto. Jumeri diduga menerima uang senilai Rp100

juta, Hamid menerima Rp75 juta, dan Sutanto menerima Rp50 juta.

ALIRAN UANG DARI VENDOR

Dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook, kemarin, dengan terdakwa Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, dua saksi sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Harnowo Susanto dan Dhani Khamidan Khoir mengaku mendapat pemberian uang berupa rupiah dan dolar dari rekanan vendor CDM Mariana Susi.

Susi diketahui merupakan vendor penyedia CDM sekaligus rekanan dari PT Bhineka Mentari Dimensi yang merupakan penyedia Chromebook.

Harnowo pun mengaku pernah menerima uang dari Susi senilai Rp250 juta. Uang tersebut, lanjut dia, diterima di sebuah gudang penyimpanan Chromebook.

Sementara itu, Dhani membenarkan dirinya pernah menerima uang dari Susi dalam bentuk rupiah dan dolar. "Penerimaan ini sebesar US\$30 ribu kemudian Rp200 juta? Iya dari Bu Susi?" cecar jaksa. "Betul," jawab Dhani. (Ant/P-1)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah membidik aset milik eks stafsus mantan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Jurist Tan. Tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan sistem Chromebook itu berstatus buron.

"Sedang kami telusuri, makanya kami juga kan teman-teman tetap bergerak, (tidak) tinggal diam," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, kemarin.

Anang berharap masyarakat memberikan informasi soal keberadaan aset milik Jurist Tan. Penyitaan dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara. "Karena akan membantu kami dalam pemulihan kerugian negara," ucap Anang.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap eks stafsus Nadiem, Jurist Tan, memiliki peran dominan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook. Fakta persidangan mengungkap peran Jurist dengan lebar.

Terkait dengan informasi soal pemindahan kewarganegaraan Jurist Tan menjadi warga negara Australia, Anang menegaskan tidak mendapatkan pemberitahuan resmi. Yang pasti, lanjut Anang, pemindahan kewarganegaraan tidak mudah untuk Jurist Tan karena sedang terkena permasalahan hukum.

“Sebelumnya, Kejagung mengungkap eks stafsus Nadiem, Jurist Tan, memiliki peran dominan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook. Fakta persidangan mengungkap peran Jurist dengan lebar.”

Sejauh ini, kata Anang, Jurist masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). "Kalau di kami, masih. Yang bersangkutan masih sebagai WNI," ujar Anang.

PENGAKUAN SAKSI

Sejumlah saksi dalam kasus itu menyebut Jurist memiliki wewenang besar di era Nadiem. Teranyar, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (26/1), mantan Direktur PAUD Kemendikbud-Ristek Muhammad Hasbi menyatakan staf khusus menteri, termasuk Jurist Tan, memiliki peran dan kewenangan yang besar dalam birokrasi kementerian.

Hasbi mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, Jurist Tan ialah sosok yang secara nyata menjalankan kewenangan luas dalam struktur birokrasi Kemendikbud-Ristek pada periode tersebut, sebagaimana disampaikannya di hadapan majelis hakim.

"Jurist memang yang kami rasakan memiliki atau melakukan kewenangan yang luas dalam birokrasi di Kemendikbud-Ristek," ujarnya.

Namun, Nadiem berulang kali menepis anggapan terkait dengan Jurist. Ia menegaskan tidak pernah memberikan kewenangan kepada seseorang di luar tugasnya. "Saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun di luar kewenangan formal mereka," ujar Nadiem, Senin (19/1). (Can/Ant/P-1)



ANTARA/PUTRA M AKBAR

KESAKSIAN AHOK: Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjawab pertanyaan saat sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Jaksa menghadirkan Ahok yang merupakan komisaris utama periode 2019-2024 sebagai saksi dalam sidang tersebut.

BANK INDONESIA

PENGUMUMAN TENDER
No.28/4/DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 27 Januari 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Perancang Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPWB) Provinsi DKI Jakarta**, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>) dengan nomor Pengadaan RFQ: 52339 dan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang lingkup Pekerjaan secara umum adalah Perancangan Kawasan Gedung Kantor, Bangunan Utama, Bangunan Penunjang, Bangunan Utilitas, Pagar, Pos Jaga, dan Sistem Bangunan sesuai dengan *Design Guidelines* Standardisasi Gedung Kantor Bank Indonesia untuk KPWB Provinsi DKI Jakarta.
- Pagu anggaran sejumlah **Rp4.711.986.200,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)** sudah termasuk PPN 12%.

III. Persyaratan Peserta Tender:

- Badan Usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia;
- Perusahaan bergerak di bidang perencanaan Pekerjaan konstruksi dan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan/atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, dengan kualifikasi dan klasifikasi/sub klasifikasi (sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021) sebagai berikut:

Klasifikasi		Kode Sub Klasifikasi	Kualifikasi
Bidang	Sub Klasifikasi		
Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
Perencanaan Arsitektur	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan dan/atau peralihan, maka harus menyampaikan tanda terima bukti pengurusan dari LPJK dan/atau LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

- Perusahaan dalam sepuluh tahun terakhir (Januari 2016 s.d. Januari 2026) memiliki pengalaman dalam Pekerjaan Perancangan untuk Bangunan Perkantoran bertingkat minimal sepuluh lantai yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas yang menyatakan Pekerjaan telah selesai, serta dokumen lain yang menjelaskan lingkup Pekerjaan (jumlah lantai);
- Memiliki Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Penguculan;
- Telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang Bukti Penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki histori penilaian kinerja kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu dua Tahun terakhir (Januari 2024 s.d. Januari 2026); dan
- Membuat Surat Pernyataan dengan isi:
 - Perusahaan tidak dinyatakan paill melalui suatu keputusan pengadilan;
 - Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - Tidak terafiliasi keperguruan Perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini; dan
 - Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

IV. Persyaratan pendaftaran:

- Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>;
- Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <https://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>;
- Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal **28 Januari s.d 4 Februari 2026** melalui <https://eprocurement.bi.go.id>;
- Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas helpdesk *E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat e-mail: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

V. Komitmen Integritas Pengadaan:

- Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
- Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
- Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
- Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera melaporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

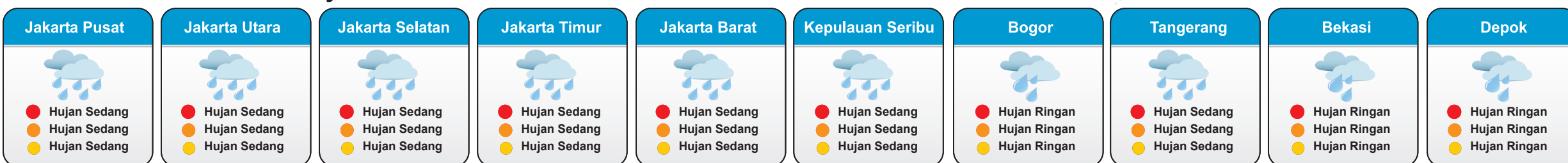
Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER



Cuaca Jakarta dan Sekitarnya

● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)



Sumber: BMKG/Litbang MI

Jalan Berlubang Ancam Keselamatan

- Jalan berlubang pascahujan kerap menjadi pemicu kecelakaan.
- Pemeliharaan permanen terhambat intensitas hujan yang masih tinggi.
- Efektivitas anggaran bergantung pada kualitas pengerjaan di lapangan.

MOHAMAD FARHAN ZUHRI
zuhri@mediaindonesia.com

PERSOALAN infrastruktur jalan di Ibu Kota kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya intensitas hujan yang memicu kerusakan di berbagai ruas jalan. Keberadaan jalan berlubang kini bukan lagi sekadar merusak estetika kota, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan nyawa warga.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, fenomena jalan berlubang pascahujan atau banjir kerap menjadi pemicu utama kecelakaan lalu lintas. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, khususnya Dinas Bina Marga, untuk bergerak lebih cepat tanpa harus menunggu keluhan warga menumpuk. "Secepat mungkin perbaikannya," tegas Bun Joi melalui keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Ia menilai mekanisme perbaikan yang ada saat ini masih cenderung reaktif. Dinas Bina Marga harus melakukan terobosan dengan patroli rutin secara berkala guna memetakan titik-titik kerusakan baru, terutama sesaat setelah hujan deras melanda. "Harus ada patroli rutin untuk memetakan titik-titik lubang baru setelah hujan."

SANGAT BERBAHAYA

Kondisi jalan yang compang-camping tersebut dinilai sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Sering kali, lubang jalan tidak kasatmata karena tertutup oleh genangan air hujan, yang kemudian mengakibatkan pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. "Lubang kecil



M/AGUS MULYAWAN

DITUTUP ROAD BARRIER: Sebuah lubang yang cukup dalam ditutup *road barrier* di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Penutupan tersebut agar tidak ada pengendara sepeda motor yang melintasi lubang tersebut karena dikhawatirkan bakal terjatuh.

yang tergenang air itu sangat berbahaya," ucap Bun Joi.

Ia menyoroti teknis perbaikan yang dilakukan Pemprov DKI selama ini, dan meminta agar metode 'tambal sulam' tidak lagi menjadi pilihan utama karena terbukti tidak efektif dan cepat rusak saat terkena air. Pihaknya mendorong adanya perbaikan

permanen untuk menjamin ketahanan jalan dalam jangka panjang.

"Pembangunan ulang, seperti *overlay* atau betonisasi. Ini terkesan anggaran terbuang sia-sia," katanya.

KUALITAS MATERIAL

Hal senada disampaikan anggota DPRD DKI Ali Lubis. Ia

menekankan bahwa Pemprov DKI tidak boleh mengangap remeh aspal yang terkelupas atau lubang-lubang jalan yang muncul seaneh banjur.

"Setiap habis hujan, banyak jalan berlubang, tergenang, bahkan aspal terkelupas. Ini bukan persoalan sepele. Sudah terlalu sering kita dengar warga jatuh, kecelakaan, bah-

kan sampai ada korban luka serius," ungkap Ali.

Ia mendesak instansi terkait untuk meningkatkan responsivitas di lapangan. Ia berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak menunggu adanya laporan yang viral di media sosial atau jatuhnya korban jiwa, baru dilakukan penanganan.

"Perbaikan jalan harus bersifat cepat, responsif, dan menyeluruh. Jangan tunggu ada korban jiwa dulu. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama," ujarnya. Selain kecepatan penanganan, Ali juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kualitas material yang digunakan serta sistem drainase di sekitar lokasi jalan rusak. Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas anggaran sangat bergantung pada kualitas pengerjaan di lapangan agar kerusakan tidak terjadi secara berulang di titik yang sama. "Kalau setiap musim hujan kerusakannya berulang di titik yang sama, berarti ada yang salah. Ini harus dievaluasi secara serius."

Jajaran legislatif memastikan akan terus mendorong koordinasi lintas dinas demi memastikan keamanan dan kenyamanan warga Jakarta saat berkendara, baik di siang maupun malam hari.

INTENSITAS HUJAN

Dalam menanggapi desakan tersebut, Gubernur DKI Pramono Anung mengakui adanya pertimbangan teknis dalam penanganan jalan rusak saat ini. Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan permanen terhambat oleh intensitas hujan yang masih sangat tinggi hingga awal Februari.

"Hal yang berkaitan dengan jalan berlubang, sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga ingin segera melakukan penambalan atau penanganan jalan-jalan yang berlubang. Tetapi, sekali lagi, karena sampai dengan tanggal 1 (Februari) curah hujannya itu akan tinggi, kalau kita lakukan sekarang, pasti satu-dua hari akan terkelupas kembali," ucapnya.

Ia mencontohkan kondisi di Jalan Gatot Subroto, yang sempat segera ditangani dengan penambalan. Namun, setelah hujan dengan intensitas tinggi turun, lapisan tambalan kembali rusak. (Ant/P-2)

Pengaspalan Ulang Tunggu Cuaca Membaik

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan penanganan darurat terhadap puluhan titik jalan rusak pascabanjir yang melanda wilayah Jakarta Barat. Meski demikian, perbaikan secara permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi masih membayangi Ibu Kota.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya memprioritaskan perbaikan sementara di 46 titik kerusakan. Langkah itu diambil guna menjaga keselamatan pengguna jalan di tengah cuaca ekstrem. "Untuk penanganan sekarang, kita lakukan perbaikan sementara, karena masih potensi hujan," ujar Siti, kemarin.

Ia menambahkan, normalisasi jalan secara menyeluruh baru akan dieksekusi setelah cuaca membaik. "Jadi hasil perbaikannya bisa lebih permanen juga," imbuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam, memerinci sebaran kerusakan di wilayahnya mencakup urat nadi transportasi penting, di antaranya Jalan Daan Mogot,

Jalan Raya Panjang, Jalan S Parman, dan Jalan Raya Joglo.

PERTIMBANGAN TEKNIS

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penundaan pengaspalan permanen bukan merupakan bentuk kelalaian, melainkan pertimbangan teknis agar anggaran dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Menurutnya, aspal yang baru dipasang akan sangat rentan terkelupas jika langsung terpapar air hujan secara terus-menerus. Itu lantaran curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga awal Februari.

Pramono pun berkaca pada apa yang terjadi terhadap Jalan Gatot Subroto. Tambalan di jalan tersebut kembali rusak akibat tergerus hujan deras tak lama setelah diperbaiki. Prinsipnya, Pemprov DKI berencana melakukan pengaspalan ulang secara menyeluruh pada titik-titik krusial demi menjamin kualitas jalan yang lebih tahan lama.

Perihal pembiayaan, Pramono memastikan bahwa pihaknya memiliki ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan. Ia telah menginstruksikan Dinas Bina Marga untuk segera tancap gas begitu intensitas hujan menurun. (Far/Ant/P-2)



M/AGUS MULYAWAN

RUSAK KEMBALI: Dua pengendara motor berjalan perlahan saat melewati jalan yang permukaannya mengelupas dan bergelombang di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Jalan berlubang tersebut sebelumnya sudah ditambal oleh petugas, tetapi intensitas hujan yang sangat tinggi sehari-hari membuat aspal tersebut mengelupas kembali.

KEHILANGAN

HILANG BPKB Motor Yamaha (DK5337 FDU), Nokr:

G3V/F0035529 Nokr: MH53G9310R/J012757

Atas Nama: I Made Fandi Rifahat

HILANG BPKB mir Yamaha Xabre Nopel:

B 4821 SDA. An: PT Petrolog Multi Usaha

Mandiri. Noka MH3RG3710HK027168.

Nosin:G3G8EO036374

HILANG BPKB Suzuki Kijang 415T 2014 Hitam

Nopol:B9498PAG Noka:MHYGDN41TEJ416224

Nosin:G15AD335872 An:MS Lumban Gaoi

HILANG BPKB TOYOTA HILUX Nopel:BA9855

BB,an:NOPENRI, Noka:MRQK5C05H1104703,

Nosin:2KD967807, Hilang di Padang

TELAH HILANG AJB Lembar Ke dua Asli,

No. 144/2008, ah Sejai Nusantara Lambang,

Luas Tanah 420 m2, Kel. Pisangan, Kec.

Ciputat Timur, TangSel

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 13 Januari 2026, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, terhadap debitur sebagai berikut:

WINDRA LIMA, berupa sebidang Tanah berikut: Bangunan terletak di Kampung Cidokom, Gg. Persik RT.004/ RW.001, Kelurahan Cidokom, Kecamatan Gunung Simbar, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan legalitas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1341/Cidokom dengan Luas Tanah 60 M² dan terdapat atas nama alias nama **WINDRA LIMA**. (Nilai Limit Rp 141.600.000,- Ulang Jaminan Sebesar Rp. 82.320.000,-)

Pelaksanaan Lelang:
 Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
 Hari / Tanggal Lelang : Rabu / 11 Februari 2026
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 Batas Akhir Penawaran : 11 Februari 2026 Pk. 14.25 WIB (sesuai waktu server)
 Alamat Domain : lelang.go.id
 Penetapan Penangan : Setelah batas akhir penawaran
 Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
 Besi Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
 Tempat Lelang : KPKNL Bogor
 Jalan Veteran No. 45, Kota Bogor, Ruang E-Auction

Persyaratan Lelang:
 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaaan".
 2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/pemundahan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dipertanggungjawabkan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawaci, Kantor Wilayah Jakarta 1.
 3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus efektif diterima KPKNL, Bogor paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 4. Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
 5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
 6. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL, Tangerang II Telp. (021) 5271198, 5271427, Bank BTN Karawaci Telp. (021) 5517849, HP 0853-1322-8118 (Indra Umar) dan HP 0877-7286-2830 (Andra) atau website www.numahumrah.bnn.co.id

Tangerang, 28 Januari 2026
 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
 KANTOR WILAYAH JAKARTA 1

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 13 Januari 2026, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 1 akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, terhadap debitur sebagai berikut:

PENY OKTA RIANI, berupa sebidang Tanah berikut: Bangunan terletak di Perumahan Green Leaf Residence Blok. C-12 No. 06, Desa Makasar, Kecamatan Negeri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan legalitas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12335 /Mekarsan dengan Luas Tanah 79 M² dan terdapat atas nama alias nama **PENY OKTA RIANI**. (Nilai Limit Rp 314.800.000,- Ulang Jaminan Sebesar Rp. 82.960.000,-)

Pelaksanaan Lelang:
 Cara Penawaran : Open Bidding (melalui internet)
 Hari / Tanggal Lelang : Rabu / 11 Februari 2026
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 Batas Akhir Penawaran : 11 Februari 2026 Pk. 10.30 WIB (sesuai waktu server)
 Alamat Domain : lelang.go.id
 Penetapan Penangan : Setelah batas akhir penawaran
 Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
 Besi Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
 Tempat Lelang : KPKNL Tangerang II
 Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Persyaratan Lelang:
 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaaan".
 2. Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/pemundahan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dipertanggungjawabkan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL, Tangerang II dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawaci, Kantor Wilayah Jakarta 1.
 3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman ini dan disetor sekaligus (bukan dicicil) serta harus efektif diterima KPKNL, Tangerang II paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 4. Uang jaminan harus disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
 5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
 6. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Info dapat menghubungi KPKNL, Tangerang II Telp. (021) 5271198, 5271427, Bank BTN Karawaci Telp. (021) 5517849, HP 0853-1322-8118 (Indra Umar) dan HP 0877-7286-2830 (Andra) atau website www.numahumrah.bnn.co.id

Tangerang, 28 Januari 2026
 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
 KANTOR WILAYAH JAKARTA 1

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantoran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

AUGUST PETRA
 1 (satu) bidang tanah berikut: bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 7161 atas nama Nyonya MEYMI KANTER dengan luas tanah 110 m² terletak di Jl. Mapalus Blok C No. 13, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (sesuai sertipikat), (selampit dikawal dengan Jalan Mapalus Blok C No. 13), Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Harga Limit Rp 1.252.000.000,- Setoran Jaminan Rp 125.000.000)

Pelaksanaan Lelang:
 Hari : Rabu
 Tanggal : 11 Februari 2026
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 Batas Akhir Penawaran : 11 Februari 2026 pukul 10:30 WIB (sesuai waktu server)
 Alamat Domain : lelang.go.id
 Tempat Lelang : Ruang E-Auction Corner, 2, Prayukti Koo Utama Dan Harau No.10 Jakarta Pusat
 Penetapan Penangan : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyetorkan diri dengan pengumuman waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-syarat lelang:
 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis atau keahadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaaan" pada domain tersebut.
 2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> dengan meremik serta mengunggah sopfoto KTP, NPWP (file ekstensi .jpg.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dibebankan langsung ke nomor rekening tersebut, Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dan Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas wajib dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file).
 3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
 4. Objek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Objek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
 5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan besa lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penanaman lain-lain.
 6. Pemenang lelang akan ditunjukkan lewat email masing-masing peserta.
 7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
 8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30022002 atau KPKNL Jakarta 1 Telp. (021) 3440260.

Tangerang, 28 Januari 2026
 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
 KANTOR WILAYAH JAKARTA 1

Jakarta, 28 Januari 2026
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 Retail Asset Management III Jakarta 1



ANTARA/DHEMAS REVIVANTO

DPR SETUJUI THOMAS DJIWANDONO: Deputi Gubernur terpilih Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono (kanan) menerima ucapan selamat dari Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono pada Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat menyetujui Thomas menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

Waspadai Respons Negatif Investor

- *Investor khawatir, di bawah jajaran pimpinan yang baru, BI kurang berkomitmen menjaga inflasi.*
- *Nilai tukar rupiah berpeluang melemah, dekati rekor terendah 16.985 per US\$.*
- *Thomas Djiwandono pastikan ingin perkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.*

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

PENELITIAN Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Deny Adi Purwanto menilai penunjukan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari pelaku pasar.

Thomas, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, dinilai membawa sentimen politik yang dapat memicu kekhawatiran investor. Hal itu berpotensi menekan pasar keuangan domestik, khususnya nilai tukar rupiah.

"Nominasi figur yang memiliki kedekat-

an politik berisiko mengganggu persepsi independensi Bank Indonesia, terutama di mata investor asing," ujarnya dalam diskusi publik Indef bertajuk Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi Bank Indonesia, kemarin.

Menurut Deny, terpilihnya Thomas oleh DPR untuk menggantikan Juda Agung dapat memicu arus keluar modal. Investor khawatir, di bawah jajaran pimpinan yang baru, BI kurang berkomitmen menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah karena terlalu mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Indef memperkirakan nilai tukar rupiah berpeluang melemah hingga mendekati rekor terendah di kisaran 16.985 per US\$. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah

diproyeksikan naik seiring dengan kekhawatiran pasar terhadap potensi pergeseran kebijakan dari pendekatan moneter yang selama ini bersifat ortodoks.

"(Hal itu) akan memberikan tekanan yang lebih berat kepada nilai tukar rupiah," ujar Deny.

PASAR WAIT AND SEE

Deny mengingatkan, Dewan Gubernur BI memiliki peran krusial dalam membentuk ekspektasi kebijakan moneter, mulai arah suku bunga acuan, besaran intervensi di pasar valuta asing, hingga pengelolaan cadangan devisa. Pasar, ungkapnya, akan mencermati arah kebijakan moneter ke depan, apakah lebih ditentukan pertimbangan institusional Bank Indonesia atau faktor personal para pengambil kebijakan.

Dari sisi respons kebijakan, terdapat dua kemungkinan besar yang dapat terjadi dengan masuknya Thomas di BI. Pertama, kebijakan moneter yang lebih kontraktif, dengan suku bunga yang lebih tinggi. Langkah itu berpotensi menopang penguatan rupiah, menarik aliran modal masuk, serta menekan ekspektasi inflasi.

Namun, kemungkinan kedua ialah kebijakan yang lebih longgar dan akomodatif terhadap kebutuhan fiskal, yang berisiko menimbulkan pelemahan nilai tukar rupiah. "Jika pelaku pasar menilai kebijakan moneter akan lebih diarahkan ke pertumbuhan ekonomi ketimbang stabilitas harga, antisipasi penurunan suku bunga bisa muncul dan ini berpotensi melemahkan rupiah," jelasnya.

STABILISASI RUPIAH

Senada dengannya, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan tantangan yang dihadapi Deputi Gubernur terpilih BI Thomas Djiwandono tidak ringan, yakni untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal.

"Dengan demikian, tugas Deputi Gubernur tidak hanya berfokus pada stabilisasi nilai tukar, tetapi juga memastikan terbangunnya koordinasi kebijakan yang solid bersama Dewan Gubernur. Upaya ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar, memperkuat fundamen ekonomi,

serta menciptakan stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan," ujar Yusuf.

SINERGI KEBIJAKAN

Seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Senin (26/1), Thomas mengaku ingin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter pada level likuiditas dan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, inisiatif yang ia cetuskan itu berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kedua otoritas, yaitu pembagian beban (*burden sharing*) pada masa pandemi covid-19.

"Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini *fundamentally* berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi," katanya.

Thomas juga menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi BI sebagaimana perintah UU.

"Seperti yang saya sampaikan dalam proses *fit and proper test*, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral," tegasnya. (Ant/E-1)

KSSK Ingatkan Meningkatnya Volatilitas Global

KOMITE Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mewaspadai meningkatnya volatilitas pasar keuangan global pada awal 2026. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan dipengaruhi dampak lanjutan kebijakan tarif impor AS dan krisis geopolitik yang menimbulkan kerentanan rantai pasok global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, kemarin, mengatakan pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok dan India yang melambat sepanjang 2026

juga akan memengaruhi pertumbuhan kawasan.

"Ketidakpastian pasar uang global meningkat, terutama dipicu oleh ketegangan perang dagang serta meluasnya eskalasi tensi geopolitik. Untuk itu, KSSK akan memperkuat asesmen dan langkah mitigasi risiko," terangnya.

Hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas sistem keuangan nasional hingga triwulan IV 2025 masih tetap terjaga, ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas.

INTERVENSI PASAR

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral terus melakukan intervensi di pasar keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Langkah tersebut ditempuh untuk meredakan tekanan jangka pendek terhadap rupiah, sekaligus memastikan pergerakan nilai tukar tetap sejalan dengan fundamen ekonomi.

Pada penutupan perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,08% ke level 16.768 per US\$.

Menurut Perry, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini bersifat teknis dan dipicu meningkatnya ketidakpastian global.

Rupiah, sambungnya, saat ini secara fundamental memiliki prospek menguat. Hal itu didukung inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan membaik, serta imbal hasil investasi di Indonesia yang tetap menarik.

KREDIT TUMBUH 9,6%

Pada kesempatan yang sama, Ketua De-

wan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan kinerja intermediasi perbankan nasional hingga akhir 2025 tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

"Pada Desember 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh 9,6% secara tahunan (*yoy*) menjadi Rp8.585 triliun," ujarnya.

Pertumbuhan kredit tersebut terutama ditopang kredit investasi yang melonjak 20,81%. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 6,58% dan kredit modal kerja meningkat 4,52%. (Ins/E-1)



ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

EKSPOR IKAN HIAS KE AMERIKA SERIKAT:

Petugas Avsec dengan disaksikan petugas kargo melakukan pengecekan akhir ikan hias asli Indonesia untuk diekspor ke Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 mencatat nilai ekspor perikanan nasional mencapai US\$2,98 miliar, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 6,57%.

PENGUMUMAN

Telah hilang warkat saham PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBI) Atas nama BERTHES TERISNO No SKS 4817 No Ledger 637151-637200

Menerima Materi dalam Bentuk Digital

- Adobe Illustrator 10/CS1-3
- Adobe Photoshop 7.0/CS 1-3
- Adobe Indesign CS1-3
- Macromedia Freehand 10/MX

MEDIA INDONESIA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IA
Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Telp (0234) 272309 Fax. (0234) 276404
Website : www.pn-ndramayu.go.id Email : pengadilan.negeri.Indramayu@gmail.com
INDRAMAYU - 45212

RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 25/Pdt.G/2017/PN Idm

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, saya Mohamad Yusuf, Jurisita Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IA, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IA dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Idm.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

B BASUKI, dahulu beralamat di PPAD Bulak Rantai G 90/14 Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon Peninjauan Kembali I**. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) permohonan Peninjauan Kembali terhadap terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Idm tanggal 30 Oktober 2017, dalam perkara antara:

1. JUDI SJAHRIL
2. HARLINA INDR
3. Ir. INDR HAWAN
4. DINA ESPANDIARY ZAHRUDDIN, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali

MELAWAN

RUSLI WAHYUDI Dkk, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan dilaksanakan melalui Koran Media Indonesia.

Indramayu, 28 Januari 2026
JURISITA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IA
Ttd.
MOHAMAD YUSUF
NIP. 196910261992031004

Cuaca Ekstrem, Wisata Labuan Bajo Mati Suri

- Untuk mencegah lumpuhnya aktivitas wisata, Asita menyarankan pelayaran parsial.
- Lesunya kunjungan wisatawan otomatis menghantam sektor pendukung.
- Taman Nasional Komodo tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan.

MARIANUS MARSELUS
marianus@mediaindonesia.com

PESONA Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu destinasi pariwisata superprioritas (DPSP) nasional kini tengah diuji alam dan sistem tata kelola yang dinilai belum berpihak pada daerah.

Sejak akhir Desember 2025 hingga memasuki pengujung Januari 2026, cuaca ekstrem di perairan Flores memaksa otoritas pelabuhan mengunci akses pelayaran.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo dalam edaran mereka menyatakan menutup sementara aktivitas pelayaran kapal wisata dan kapal lainnya akibat potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut pada 20-27 Januari 2026. Dampaknya, industri pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Manggarai Barat itu kini berada dalam kondisi mati suri.

Penutupan total aktivitas pelayaran wisata menuju Taman Nasional (TN) Komodo oleh KSOP Kelas III Labuan Bajo menjadi hulu dari rentetan persoalan ekonomi. Kebijakan yang diambil demi keselamatan jiwa tersebut nyatanya membawa konsekuensi finansial yang berat bagi para pelaku industri pariwisata di wilayah itu.

Badai pembatalan reservasi melanda hampir seluruh lini usaha. Para pemilik pinisi, agen perjalanan, hingga pemandu wisata kini harus menghadapi realitas pahit; pendapatan nol, sementara biaya perawatan aset tetap berjalan.

“Sejak penutupan awal Januari, hampir semua reservasi wisata di Labuan Bajo dibatalkan. *Travel agent* terpaksa mengembalikan dana tamu secara masif. Ini situasi yang sangat berat karena banyak dari kami yang baru saja mulai bangkit,” ujar Pengurus Himpunan Pramuwisata NTT Fransiskus Hambut saat ditemui di Labuan Bajo.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTT Oyan Kristian juga menyatakan hal serupa. Oyan menegaskan penutupan pelayaran wisata ke TN Komodo yang berkepanjangan menciptakan kerumitan administratif yang pelik, terutama terkait kebijakan pengembalian dana (*refund*).

Ketidaksamaan pandangan antara penyedia jasa transportasi, hotel, dan maskapai penerbangan membuat posisi agen perjalanan terjepit.

“Ada operator kapal yang mengembalikan dana 100%. Namun, hotel dan maskapai umumnya menolak karena menganggap operasional mereka masih normal. Padahal, alasan utama wisatawan datang ke sini ialah berlayar. Jika pelayaran ditutup, aktivitas wisata praktis lumpuh. Ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” tegas Oyan.

PELAYARAN PARSIAL

Untuk mencegah lumpuhnya aktivitas wisata, Oyan menyarankan penerapan pelayaran secara parsial untuk kapal wisata di Labuan Bajo sebagai alternatif.

“Kita masih bisa memberlakukan buka tutup parsial. Artinya, jika pelayaran ke Pulau Padar dan Pulau Komodo atau spot-spot wisata yang lebih jauh dinilai berbahaya karena cuaca buruk, izin tetap diberikan ke destinasi terdekat yang masih



ANTARA/GECIO VIANA

BERHENTI OPERASI KARENA CUACA BURUK: Sejumlah kapal wisata lego jangkar akibat cuaca buruk di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (22/1). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar (SPB) bagi seluruh kapal wisata, termasuk *speed boat*, pada 20-27 Januari 2026 karena cuaca buruk di perairan sekitar Labuan Bajo.

memungkinkan untuk dikunjungi,” kata Oyan.

Menurut Oyan, wisatawan yang ingin melihat komodo, misalnya, dapat diarahkan ke Pulau Rinca. Aktivitas *snorkeling* bisa dilakukan di spot-spot dekat Labuan Bajo yang dinilai aman, seperti Pulau Seraya dan Kanawa.

“Wisatawan banyak yang batal datang karena mereka tahu tidak bisa ke Komodo. Kalau tamu di pelabuhan sepi, kami di restoran pun ikut terdampak. Kami terpaksa memangkas jam operasional untuk menekan biaya.”

Anton
Pengelola Restoran Seafood

EFEK DOMINO

Lesunya kunjungan wisatawan secara otomatis menghantam sektor pendukung, terutama kuliner. Pantauan di titik-titik pusat keramaian seperti kawasan Waterfront, Kampung Ujung, hingga sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Labuan Bajo memperlihatkan pemandangan yang kontras dari biasanya. Restoran dan kafe yang biasanya penuh sesak pada malam hari kini tampak lengang.

Anton, pengelola sebuah restoran *seafood* di Labuan Bajo, menyebut omzet usahanya merosot tajam hingga 40%. Penurunan itu merupakan akumulasi dari berkurangnya kunjungan pascalibur akhir tahun yang diperparah larangan berlayar akibat

Labuan Bajo, Cuaca Ekstrem Menghantam, PNPB tak Mengalir ke Daerah

Cuaca Ekstrem Lumpuhkan Pariwisata

- Seluruh aktivitas kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo ditutup total.
- Penutupan diperpanjang dari 20 Januari menjadi 27 Januari 2026.
- Disebabkan cuaca ekstrem di perairan Flores sejak akhir Desember 2025 hingga Januari 2026.

Dampak ke Sektor Pariwisata

- Hampir seluruh reservasi wisata dibatalkan.
- *Travel agent* melakukan *refund* kepada wisatawan.
- Kapal wisata tidak beroperasi sehingga mengganggu di pelabuhan.
- Pendapatan pelaku wisata turun drastis.

Upaya Bertahan Pelaku Usaha

- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupaya mempercepat pengembangan destinasi darat.
- Mengalihkan paket wisata ke destinasi darat, seperti Gua Batu Cermin, Desa Wisata Warloka Pesisir, dan Puncak Waringin.
- Namun, daya tarik terbatas dan tidak mampu menggantikan wisata bahari.

Keterangan Tinggi pada Wisata Bahari

- Sekitar 80% wisatawan datang untuk paket wisata laut (*diving*, *snorkeling*, *island hopping*).
- Jumlah wisatawan 2025
 - Total wisatawan: 500.008 orang
 - Kunjungan ke TN Komodo: 432.022 orang (86%)
- Ekonomi Labuan Bajo sangat rentan dan bergantung pada cuaca.



Pendapatan Naik, Daerah tak Dapat Bagian

- Pengunjung TN Komodo: 432.022 wisatawan
- Pendapatan tiket TN Komodo 2025: Rp100,19 miliar (target awal Rp57 miliar)
- Seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masuk ke kas negara (Kemenkeu).
- Pemkab Manggarai Barat menangani masalah sampah hingga penyediaan fasilitas pelayanan publik, tanpa mendapatkan bagi hasil dari PNPB.

Sumber: Pemkab Manggarai Barat/BTNK/Litbang MI

cuaca ekstrem.

“Wisatawan banyak yang batal datang karena mereka tahu tidak bisa ke Komodo. Kalau tamu di pelabuhan sepi, kami di restoran pun ikut terdampak. Kami terpaksa memangkas jam operasional untuk menekan biaya,” ungkap Anton.

TN KOMODO JADI ANDALAN

Aktivitas wisata bahari di Taman Nasional Komodo tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan. Aktivitas seperti *diving*, *snorkeling*, dan jelajah pulau masih menjadi pilihan utama pelancong yang datang ke Labuan Bajo. Ketua Perhimpunan Penyelam Pro-

fesional Komodo (P3Kom) Marsel Betong mencatat sekitar 80% wisatawan ke Labuan Bajo hanya tertarik pada paket wisata bahari. Ketergantungan ekstrem itu menjadikan ekonomi Labuan Bajo sangat rapuh terhadap perubahan cuaca.

Dinas Parekrafbud Manggarai Barat mencatat, dari 500.008 wisatawan pada 2025, sebanyak 432.022 orang atau 86% terkonsentrasi di TN Komodo. Dalam menanggapi fakta itu, Kepala Dinas Parekrafbud Stefanus Jemsifory menyatakan pihaknya sedang mempercepat pengembangan destinasi darat.

“Kami tengah membenahi desa

wisata, air terjun, dan situs budaya sebagai alternatif. Langkah ini penting agar ketika laut sedang tidak bersahabat, wisatawan masih memiliki alasan untuk tinggal lebih lama di Labuan Bajo dan ekonomi lokal tetap berputar,” jelas Stefanus.

Kini, Labuan Bajo berada di persimpangan jalan. Sembari menunggu cuaca membaik dan laut kembali tenang, para pelaku wisata hanya bisa berharap adanya kebijakan yang lebih suportif dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk mitigasi ekonomi pada masa krisis maupun pembagian kue pendapatan yang lebih adil bagi daerah. (Ant/E-2)

Cuan Pusat di Atas Beban Daerah

DI tengah jeritan pelaku usaha lokal, sebuah anomali data muncul dari balik layar konservasi.

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) mencatat lonjakan pendapatan negara yang sangat signifikan sepanjang 2025. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari TN Komodo menembus angka fantastis Rp100,19 miliar, melampaui target awal sebesar Rp57 miliar.

Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga menyebutkan kenaikan itu dipicu efektivitas aplikasi *Siora* dan penyelesaian tarif tiket yang mulai berlaku

sejak 30 Oktober 2024. Meskipun jumlah kunjungan hanya naik sekitar 98 ribu orang, nilai PNPB melompat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2024.

Namun, di balik angka gemilang tersebut, terselip isu keadilan fiskal. Seluruh pendapatan jumbo itu langsung disetor ke kas negara (Kemenkeu), tanpa meninggalkan porsi bagi kas daerah Manggarai Barat.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi secara terbuka menyampaikan kegelisahannya kepada pemerintah pusat. Menurut Edistasius, daerah

Daerah selama ini hanya menjadi ‘penanggung beban’ dari aktivitas pariwisata TN Komodo, mulai masalah sampah hingga penyediaan fasilitas pelayanan publik, tanpa mendapatkan bagi hasil dari PNPB tersebut.”

selama ini hanya menjadi ‘penanggung beban’ dari aktivitas pariwisata TN Komodo, mulai masalah sampah hingga penyediaan fasilitas pelayanan publik, tanpa mendapatkan bagi hasil

dari PNPB tersebut.

“Di beberapa zona TNK ada yang namanya PNPB. Besar harapan kami ada skema bagi hasilnya. Kami yang menangani sampah dan masalah di

lapangan, tapi distribusi dananya tidak sampai ke kami,” ujar Edistasius.

Respons Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi adanya persoalan struktural dalam birokrasi keuangan negara. “Masalah kita sama, kementerian pun tidak mendapat bagi hasil karena semua masuk ke Kementerian Keuangan,” kata Raja Juli saat kunjungannya ke Labuan Bajo pada Juli 2025. Hal itu menggarisbawahi perlunya reformasi tata kelola keuangan agar daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah eksploitasi potensi wisatanya. (MM/E-2)



ANTARA FOTO/NOVRIAN A

PENCARIAN KORBAN: Tim SAR melakukan pencarian korban bencana tanah longsor di Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kemarin. Pada hari keempat pencarian hingga pukul 15.30 WIB, tim SAR Gabungan telah berhasil mengevakuasi sembilan kantong jenazah. Berdasarkan data DVI Polri hingga Selasa (27/1), pihak DVI telah menerima sebanyak 48 kantong jenazah untuk diidentifikasi.

Pemprov Jateng Perpanjang OMC

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi akibat tingginya curah hujan.

Berdasarkan pemantauan, kemarin, intensitas hujan di berbagai wilayah Jawa Tengah kembali meningkat. Sejumlah daerah diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir sejak siang hari. Kondisi itu memicu kekhawatiran warga, terutama di wilayah rawan bencana, akan terjadinya bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalakhar BPBD) Jawa Tengah Bergas C Penanggulangan mengatakan OMC diperpanjang hingga 29 Januari 2026 sebagai bagian dari penanganan darurat bencana.

"Modifikasi cuaca ini bertujuan menekan curah hujan di wilayah terdampak bencana. Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026," ujarnya.

Menurut Bergas, pelaksanaan OMC dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi itu telah berlangsung sejak Kamis (15/1) dengan sasaran awal wilayah Muria Raya, kemudian bergeser ke kawasan Pekalongan dan Kendal sejak Selasa (20/1), menyesuaikan pola pergerakan awan hujan.

Di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan langkah percepatan penanganan banjir luapan Bengawan Jero dengan membuka pintu air Sluis Kuro dan mengeruk endapan lumpur. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan pembukaan pintu air dilakukan setelah tinggi muka air Bengawan Solo dinyatakan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kali Blawi.

"Bengawan Solo dari hulu Bojonegoro sampai hilir Lamongan dan Gresik sudah turun dan normal. Pembukaan DAM Kuro ini sebagai upaya percepatan menuntaskan genangan banjir," kata Yuhronur Efendi, kemarin. Banjir sebelumnya merendam lima kecamatan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Tim SAR Gabungan di Nusa Tenggara Timur berhasil menemukan korban terakhir longsor di Kampung Pau, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Korban bernama Yustina Mira, 19, ditemukan pada hari kelima pencarian, Selasa (27/1), sekitar pukul 10.30 Wita.

"Korban ditemukan sekitar lima meter dari rumahnya dalam kondisi tertimbun material longsoran sedalam satu hingga dua meter," ujar Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator, Fathur Rahman.

Dengan ditemukannya dua korban longsor tersebut, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. (HT/AS/YK/PO/E-2)

Pemkab Siap Relokasi Korban Longsor Cisarua

- Tim SAR gabungan kembali menemukan sembilan bodypack korban.
- Tim SAR juga melakukan perluasan area pencarian.
- Walhi Jawa Barat meminta pemerintah daerah bertanggung jawab.

DEPI GUNAWAN
depigunawan@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, terus melakukan upaya penanganan pascabencana tanah longsor yang melanda Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Selain fokus pada pencarian korban yang masih hilang, pemerintah daerah mulai memetakan lokasi relokasi bagi warga terdampak yang permukimannya rusak dan tidak lagi aman untuk dihuni.

Incident Commander bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Ade Zakir mengatakan saat ini Pemkab Bandung Barat tengah melakukan inventarisasi aset berupa tanah desa yang berpotensi dijadikan lokasi relokasi. Pemetaan tersebut diprioritaskan pada tanah kas desa yang statusnya jelas dan memungkinkan untuk segera dimanfaatkan.

"Sedang kita cari, inventarisasi, terutama tanah kas desa. Kalau sudah, kita cek dulu, aman secara geologi atau tidak. Kita kaji dulu," kata Ade Zakir, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan setiap lahan yang diusulkan sebagai lokasi relokasi akan terlebih dahulu diperiksa oleh pihak geologi untuk memastikan tidak berada di zona rawan longsor atau bencana lainnya.

Apabila tidak ditemukan lahan desa yang sesuai, Pemkab Bandung Barat menyiapkan opsi kedua, yakni membeli tanah milik warga atau pihak lain. Pembelian tanah dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah pemerintah maupun dengan memanfaatkan dana bantuan dan donasi yang terkumpul dari berbagai pihak.

48 BODYPACK

Hingga hari keempat operasi pencarian, kemarin, tim SAR gabungan kembali menemukan sembilan bodypack korban di lokasi tanah longsor Kampung Pasirkuning. Dengan penemuan tersebut, total bodypack yang berhasil dievakuasi sejak hari pertama kejadian

mencapai 48.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian menyampaikan bahwa seluruh bodypack yang ditemukan telah diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi lebih lanjut. "Hari keempat kita menemukan sembilan bodypack. Seluruh bodypack sudah diserahkan kepada tim DVI. Jadi sampai dengan pukul 18.07 WIB, total temuan

dari hari pertama sampai sekarang ada 48 bodypack," katanya di lokasi, kemarin.

Ade Dian juga mengungkapkan total yang masih dalam pencarian ada 32 orang. "Untuk pencarian hari ini dihentikan dulu dan kami akan lanjutkan besok," ujarnya.

PERLUAS PENCARIAN

Proses pencarian pada hari keempat sempat terkendala hujan dengan intensitas sedang yang mengguyur wilayah Cisarua dan sekitarnya. Selain itu, tim SAR melakukan perluasan area pencarian dengan menggeser sebagian kekuatan dari sektor A2 ke sektor B2 setelah evaluasi lapangan menunjukkan potensi adanya korban di wilayah tersebut.

Dalam operasi SAR, sejumlah instansi

turut memberikan dukungan, termasuk Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmatan) Kota Bandung. Sejak hari pertama kejadian, Diskarmatan Kota Bandung mengerahkan personel untuk membantu proses evakuasi korban yang tertimbun material longsor.

Dukungan juga datang dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purwakarta yang mengirimkan satu regu Unit SAR 0914 ke lokasi bencana. Tim tersebut diterjunkan sebagai bentuk solidaritas lintas daerah dalam penanganan bencana di Cisarua.

Selain pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak oleh bencana menjadi perhatian. Satuan Brimob Polda Jawa Barat mendirikan dapur umum dan pos layanan kesehatan di lokasi bencana. Puluhan personel Brimob dikerahkan untuk memastikan kebutuhan makanan dan layanan medis bagi korban terpenuhi.

WALHI TUNTUT PEMDA

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat meminta pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas tragedi tanah longsor Cisarua. Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwank menilai bencana tersebut bukan semata peristiwa alam, melainkan juga akibat degradasi lingkungan yang berlangsung lama di kawasan Bandung Utara.

"Kawasan Cisarua merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air dan penyangga keselamatan lingkungan," kata Wahyudin. (RZ/SG/AN/E-2)

PENGUMUMAN PUTUSAN PAILIT PT. NAGA MAS JAYA SUKSES, IR. BAMBANG TRIHADI DAN PT BENUA EMAS JAYA RAYA (DALAM PAILIT) DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini diumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby, tertanggal 22 Januari 2026 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PT Naga Mas Jaya Sukses, Ir. Bambang Trihadi, dan PT Benua Emas Jaya Raya, pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Sih Yulianti, SH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Sdr. a. Mangatur Jetro, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-46 AH.04.05-2024 tertanggal 9 Mei 2024; b. Fransisco Samuel Halomano Purba, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-370 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022; c. Abdullah Hamidy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41 AH.04.05-2024 tertanggal 07 Mei 2024 sebagai Kurator;
4. Menetapkan biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp 2.644.000 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby, tertanggal 27 Januari 2026 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

NO.	AGENDA	JADWAL	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Kreditor Pertama	Selasa, 10 Februari 2026	10.00 WIB - selesai	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 24-28 Surabaya, Jawa Timur
2	Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak	Rabu, 18 Februari 2026	16.00 WIB (Hari Kerja)	Kantor Sekretariat Tim Kurator: PT Naga Mas Jaya Sukses, Ir. Bambang Trihadi, dan PT Benua Emas Jaya Raya (Dalam Pailit) beralamat di Gedung Arva Lt. 3, Jl. Cikini Raya No.60, Jakarta Pusat 10330, DKI Jakarta
3	Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak	Selasa, 3 Maret 2026	10.00 WIB - selesai	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 24-28 Surabaya, Jawa Timur

Untuk itu kami mengundang Para Kreditor PT Naga Mas Jaya Sukses, Ir. Bambang Trihadi, dan PT Benua Emas Jaya Raya (Dalam Pailit) agar segera mengajukan tagihan dengan menyerahkan copy dokumen serta memperlihatkan foto bukti atau dokumen dan dilengkapi data diri Para Kreditor (alamat, e-mail, nomor telepon) dengan menyebutkan sifat tagihan kepada Tim Kurator yang beralamat di:

KANTOR SEKRETARIAT TIM KURATOR
Gedung Arva Lt. 3, Jl. Cikini Raya No.60, Jakarta Pusat 10330, DKI Jakarta
Hp: 082123079833 e-mail: timkuratorpailit37@gmail.com

Sehubungan dengan amar Putusan dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut, maka dengan ini Tim Kurator PT Naga Mas Jaya Sukses, Ir. Bambang Trihadi, dan PT Benua Emas Jaya Raya (Dalam Pailit), memberitahukan kepada seluruh Kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghadiri Rapat-Rapat Kreditor sebagaimana dimaksud di atas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Pengumuman ini diberitahukan, sekaligus berlaku pula sebagai Undangan resmi bagi Debitor Pailit, Para Kreditor, Kantor Pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 28 Januari 2026
Tim Kurator
PT Naga Mas Jaya Sukses, Ir. Bambang Trihadi, dan PT Benua Emas Jaya Raya (Dalam Pailit)
tdt tdt tdt
Mangatur Jetro, S.H. Fransisco Samuel Halomano Purba, S.H. Abdullah Hamidy, S.H.



PT JASAMARGA AKSES PATIMBAN

PENGUMUMAN

TENDER UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI

Nomor: 002/KR-OPS-JAP/UND/II/2026

PT Jasamarga Akses Patimban sebagai Badan Usaha Jalan Tol Akses Patimban akan mengadakan Tender Umum Dengan Prakualifikasi Pengadaan Jasa Lain Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional PT Jasamarga Akses Patimban Tahun 2026, untuk:

Pekerjaan : Sewa Kendaraan Operasional
PT Jasamarga Akses Patimban Tahun 2026
Sumber Dana : RKAP
PT Jasamarga Akses Patimban

Ketentuan dan syarat - syarat kualifikasi dapat diakses melalui website PT Jasa Marga (Persero) Tbk. <https://jasamarga.com> di halaman Pengadaan, dengan pendaftaran tender dilakukan secara online pada:

Hari/ Tanggal : Rabu - Selasa
28 Januari - 03 Februari 2026
Pukul : 09.00 - 16.00 WIB
Link Pendaftaran : <https://bit.ly/4qdAvdT>

Subang, 28 Januari 2026
Panitia Pemilihan





Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

Setiawan Budi Utomo

Pemerhati keuangan dan kebijakan publik, dosen tamu pascasarjana di PTN dan PTS

SCAM Kamboja bukan sekadar cerita kriminal lintas negara atau kisah tragis warga negara yang terjerat pekerjaan palsu di luar negeri. Ia merupakan alarm keras bagi negara bahwa kejahatan siber keuangan telah bertransformasi menjadi ancaman sistemis terhadap kepercayaan publik, stabilitas sektor jasa keuangan, dan agenda besar digitalisasi ekonomi Indonesia.

Ketika ribuan rekening digunakan sebagai penampung dana hasil kejahatan dan triliunan rupiah uang masyarakat menguap, persoalannya bukan lagi soal kecerdikan pelaku, melainkan pada ketertinggalan sistem perlindungan negara dari laju kejahatan digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja bersama sejumlah wilayah di Asia Tenggara berkembang menjadi simpul utama operasi penipuan daring internasional. Ribuan orang direkrut, dipindahkan lintas negara, lalu dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan (*scam centres*). Dari lokasi inilah dijalankan berbagai modus mutakhir: *romance scam*, penipuan investasi kripto dan saham luar negeri, tawaran kerja paruh waktu palsu, impersonasi aparat dan lembaga keuangan, hingga penerusan berbasis kecerdasan buatan dan *deepfake*.

Korban dari praktik itu tersebar lintas negara, termasuk Indonesia. Kesalahan terbesar ialah memandang fenomena itu sebagai

‘urusan negara lain’. Justru sebaliknya, *scam* Kamboja harus dibaca sebagai peringatan strategis bahwa Indonesia sedang berada di medan perang baru: perang terhadap kejahatan siber keuangan.

DARI KEJAHATAN INDIVIDUAL KE INDUSTRI KRIMINAL

Kejahatan siber keuangan hari ini tidak lagi bersifat individual atau insidental. Ia telah berevolusi menjadi ekosistem industri kriminal yang bekerja dengan logika bisnis modern. Ada struktur organisasi, pembagian peran, target pasar, skrip komunikasi terstandar, tim teknologi informasi, hingga mekanisme pencucian uang yang rapi dan berlipat.

Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) periode 2024–2025 memperkirakan pusat-pusat *scam* di kawasan Asia Tenggara menghasilkan puluhan miliar dolar AS per tahun. Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus: skala ekonomi kejahatan yang sangat besar dan kesenjangan kecepatan adaptasi antara pelaku kejahatan yang bergerak lincah dengan sistem regulasi dan penegakan hukum yang masih terfragmentasi oleh batas negara dan sektor.

Kompleksitas persoalan semakin kentara ketika kejahatan siber ini beririsan kuat dengan perdagangan orang. INTERPOL dalam Global Crime Trend Update 2025 mencatat bahwa korban perdagangan manusia yang

terkait dengan pusat *scam* berasal dari puluhan negara dan sebagian besar dipindahkan ke kawasan Asia Tenggara. Di antara operator lapangan memang ada yang sejatinya ialah korban direkrut dengan janji pekerjaan legal, lalu dipaksa menipu orang lain di bawah ancaman dan kekerasan.

Namun, dalam konteks kejahatan siber yang terorganisasi itu, mereka tetap akan dikejar dan tidak luput dari jerat hukum. Inilah yang dalam literatur kriminologi disebut sebagai *crime convergence*: pertemuan antara kejahatan siber, pencucian uang, dan kejahatan kemanusiaan. Artinya, darurat perang melawan *scam* bukan hanya soal penindakan pidana, melainkan juga perlindungan warga negara dan martabat manusia.

INDONESIA: PASAR DIGITAL BESAR, RISIKO SISTEMIS

Indonesia berada di jantung persoalan ini. Dengan populasi digital yang besar, tingkat inklusi keuangan yang terus meningkat sejak Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019–2023, serta penetrasi *mobile banking* dan dompet digital yang tinggi, Indonesia menjadi pasar potensial sekaligus target empuk bagi kejahatan siber keuangan.

Paradoksnya jelas: digitalisasi keuangan yang mendorong efisiensi dan inklusi juga membuka ruang risiko baru bila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang kuat.

Sejak diluncurkan pada 22 November 2024, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat hingga Mei 2025 lebih dari 135 ribu laporan penipuan. Rekening yang

terindikasi terlibat mencapai lebih dari 219 ribu rekening dengan kerugian sekitar Rp2,6 triliun. Dana yang berhasil diblokir baru sekitar Rp163 miliar atau sekitar 6%. Angka itu menegaskan bahwa kecepatan pelaporan dan pemutusan aliran dana menjadi kunci karena begitu dana berpindah melalui rekening penampung, dompet digital, atau aset kripto, peluang pemulihan menyusut drastis.

Sejak 2017 hingga 2025, Satgas PASTI telah menghentikan lebih dari 13 ribu entitas keuangan ilegal. Negara hadir dan bekerja, tetapi suplai pelaku dan modus baru terus bermunculan. Di ruang digital, pemerintah juga menangani lebih dari satu juta konten bermuatan judi online dan penipuan sepanjang 2024–2025, sebuah indikator masifnya ‘pabrik prospek korban’ di dunia maya.

KETUA OJK: ANCAMAN SISTEMIS TERHADAP KEPERCAYAAN

Dalam berbagai pernyataan resmi sepanjang 2024–2025, Ketua Dewan Komisiner OJK menegaskan bahwa penipuan digital dan kejahatan siber keuangan bukan lagi persoalan kasuistik, melainkan ancaman sistemik terhadap kepercayaan dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Ketua OJK menekankan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan integritas sistem. Tanpa perlindungan yang memadai, digitalisasi justru memperluas kerentanan masyarakat dan menciptakan risiko baru.

Karena itu, OJK mendorong kolaborasi lintas otoritas, industri jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan platform digital dengan fokus pada pencegahan dini, percepatan respons, dan pemutusan aliran dana hasil kejahatan.

MENGAPA SCAM DIGITAL SANGAT EFEKTIF?

Efektivitas scam digital dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teori. George Akerlof (1970) menjelaskan asimetri informasi sebagai sumber kegagalan pasar; dalam *scam*, pelaku menciptakan ketimpangan informasi dan tekanan waktu. Praktik ini diperkuat oleh rekayasa sosial sebagaimana dipaparkan Kevin Mitnick (2002), manipulasi psikologis yang menembus pertahanan rasional korban.

Dari sisi kriminologi, Cohen dan Felson (1979) melalui *routine activity theory* menunjukkan kejahatan terjadi saat pelaku termotivasi bertemu target layak tanpa penjagaan efektif. Di dunia digital, penjagaan mencakup KYC, desain sistem pembayaran, algoritma deteksi fraud, dan kebijakan platform.

Dari sudut biaya transaksi, Coase (1937) dan Williamson (1985) menjelaskan mengapa teknologi dan AI menurunkan biaya kejahatan dan menaikkan potensi keuntungan.

MAKNA ‘DARURAT PERANG’ YANG SUBSTANTIF DAN TERUKUR

Istilah darurat perang terhadap kejahatan siber bukan retorika. Kejahatan siber keuangan menyerang fondasi kepercayaan. Strategi nasional harus menempatkan pemutusan aliran uang sebagai prioritas, pemberantasan *money mule*, integrasi kebijakan sektor keuangan—ruang digital, literasi sebagai imunisasi perilaku, serta kerja sama internasional yang agresif sebagaimana direkomendasikan UNODC 2024.

PENUTUP

Dalam teori ekonomi kelembagaan, Douglass C North (1990) menegaskan bahwa institusi dibangun untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam konteks ini, keamanan keuangan digital ialah prasyarat kepercayaan. Ketika penipuan dibiarkan merajalela, yang terkikis bukan hanya dana masyarakat, melainkan juga legitimasi sistem keuangan formal itu sendiri.

Indonesia telah memiliki fondasi: Satgas PASTI, IASC, penguatan regulasi, dan koordinasi lintas otoritas. Namun, scam Kamboja mengingatkan bahwa fondasi saja tidak cukup. Diperlukan lompatan kebijakan yang lebih cepat, lebih tegas, dan lebih terintegrasi agar negara tidak selalu tertinggal satu langkah dari kejahatan.

Darurat kejahatan siber keuangan menuntut respons darurat kebijakan. Bukan untuk menakut-nakuti publik, melainkan untuk memastikan bahwa digitalisasi keuangan Indonesia bergerak maju dengan aman, berkeadilan, dan berdaulat. Tanpa itu, kemajuan teknologi justru akan menjadi senjata yang berbalik melukai dan merugikan masyarakatnya sendiri.

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Muhammad Faisal

Dosen ekonomi FEB Universitas Yarsi dan peneliti UKM Center FEB Universitas Indonesia

PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membangun 10 universitas baru di Indonesia. Kampus-kampus itu dirancang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, teknologi farmasi, hingga sains.

Dikutip dari *Metro TV News*, Presiden Prabowo menyampaikan, “Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun.”

MEMULAI DARI NOL

Rencananya, universitas-universitas tersebut akan mulai menerima mahasiswa pada 2028. Ini merupakan rencana besar dan ambisius. Namun, pertanyaannya: apakah membangun 10 universitas baru merupakan strategi terbaik untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia, khususnya di bidang kedokteran?

Menarik untuk kita bedah satu per satu. Pertama, membangun 10 universitas baru bukanlah solusi instan. Itu sama saja dengan memulai dari nol. Saya justru lebih sepakat jika pemerintah fokus melakukan reformasi tata kelola universitas yang sudah ada.

Secara kuantitas, Indonesia tidak kekurangan kampus. Saat ini terdapat lebih dari 4.000 kampus di Indonesia. Sebagai

perbandingan, Amerika Serikat memiliki sekitar 3.900 kampus, sementara Tiongkok sekitar 3.000. Padahal, jumlah penduduk Indonesia lebih sedikit daripada kedua negara tersebut. Artinya, dari sisi kuantitas, Indonesia sebenarnya sudah cukup untuk menampung generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Masalah utama kita bukan jumlah kampus, melainkan kualitas dan tata kelolanya.

Kedua, meskipun jumlah universitas kita jauh lebih banyak, jumlah dosen justru sangat timpang. Tiongkok memiliki sekitar 1,9 juta dosen, Amerika Serikat sekitar 1,5 juta dosen, sementara Indonesia hanya sekitar 300 ribu dosen. Ketimpangan ini semakin diperparah dengan dukungan anggaran pendidikan dan riset yang masih jauh tertinggal, bahkan jika dibandingkan dengan Tiongkok, AS, apalagi Inggris.

Secara tata kelola, ini menjadi pekerjaan panjang sistem pendidikan di Indonesia, evaluasi tata kelola dan distribusi setiap kampus yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Marauke menjadi pekerjaan rumah pertama yang harus dikerjakan dahulu sebelum membuka kampus-kampus baru.

Ketiga, daripada membangun 10 universitas baru, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran tersebut untuk memperkuat universitas yang sudah ada. Hampir

setiap provinsi di Indonesia memiliki PTN atau PTS besar yang masih memiliki ruang sangat luas untuk dikembangkan.

Jika pemerintah serius menjadikan pendidikan sebagai prioritas, intervensi besar melalui perbaikan radikal terkait dengan tata kelola universitas untuk menuju *world class university* akan jauh lebih adil dan merata. Mendirikan universitas baru jelas membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih lama dengan hasil yang belum tentu optimal, terlebih jika kampus-kampus tersebut hanya dibangun di kota-kota besar.

Keempat, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prasyarat penting. Seperti yang sering disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, percepatan ekonomi sangat menentukan keupasan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang tumbuh akan membuka akses pendidikan yang lebih luas.

Data BPS 2024 menunjukkan bahwa hanya 10,20% penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kuliah belum menjadi pilihan utama masyarakat. Faktor ekonomi masih menjadi penghambat utama, terutama bagi keluarga kelas bawah, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Jika kondisi ini tidak segera diatasi, cita-cita Indonesia emas 2045 berisiko tidak optimal karena generasi produktif kita tumbuh tanpa fondasi pendidikan yang kuat.

Kelima, perhatian Presiden Prabowo terhadap kekurangan dokter patut diapresiasi. Untuk diketahui bersama, WHO menetapkan

standar ideal satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Bahkan India, dengan jumlah penduduk lima kali lebih besar dari Indonesia, memiliki rasio dokter yang lebih baik.

Namun, pembukaan fakultas kedokteran (FK) secara besar-besaran perlu dilakukan secara terkendali. Ekspansi FK harus disertai sistem audit jangka pendek yang ketat. Kualitas lulusan menjadi taruhan utama karena pada akhirnya dokter ialah penyedia layanan kesehatan yang menyangkut nyawa manusia.

Keenam, dalam konteks Indonesia, pemerintah perlu memiliki target rasio kebutuhan dokter per kabupaten/kota yang secara mudah dapat diakses dan diketahui publik, khususnya calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hebat saya, untuk strategi jangka pendek, kuota penerimaan mahasiswa FK akan lebih baik jika berbasis kebutuhan daerah. Setiap institusi perlu menerapkan kuota regional yang disertai perjanjian pengabdian ke daerah defisit dokter.

Namun, skema ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Fakta di lapangan untuk program spesialis menunjukkan banyak penerima rekomendasi dari pemerintah daerah dan rekomendasi dari rumah sakit di daerah yang tidak kembali mengabdikan setelah lulus. Tanpa pengawasan ketat hingga ke tahap hilir (pasca lulus dari program pendidikan), kebijakan ini berpotensi gagal karena hanya menjadi formalitas di awal saja.

Ketujuh, mekanisme yang matang mutlak

diperlukan. Perizinan pembukaan program FK baru tidak boleh serampangan. Jika tidak dikendalikan, ekspansi FK justru berisiko menimbulkan *oversupply* dokter yang tidak merata, penurunan mutu, hingga konflik profesi di masa depan. Proses bertahap dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan harus dikedepankan.

Di samping itu, langkah yang diinisiasi pemerintah dalam memberikan insentif hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter di daerah patut diapresiasi. Skema ini dapat menjadi daya tarik bagi lulusan FK untuk mengisi wilayah defisit selama dikawal dengan serius dan berkelanjutan.

BUKAN SOLUSI UTAMA

Pada akhirnya, membangun 10 universitas baru bukanlah solusi utama yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Prioritas seharusnya diarahkan pada optimalisasi kampus yang sudah ada, pemerataan infrastruktur pendidikan, serta penguatan kualitas dosen dan tata kelola secara berkelanjutan.

Saat ini, tidak sedikit universitas swasta kesulitan mendapatkan mahasiswa, sementara angka partisipasi pendidikan tinggi masih rendah akibat tekanan ekonomi. Tanpa pembenahan struktural, penambahan universitas justru berisiko memperlebar masalah lama, bukan menyelesaikannya.

Indonesia tidak kekurangan gedung kampus. Yang kita butuhkan ialah pendidikan tinggi yang kuat, merata, dan bermutu, bukan sekadar bertambah jumlahnya.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opini@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MEDIA INDONESIA
A Part of
MEDIA GROUP NETWORK

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Gaudensius Suhardi
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Abdul Kohar

Dewan Redaksi Media Group:
Ketua: Eiman Saragih (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota)
Anggota: Mohammad Mirdal Akib, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Suryopratomo, Usman Kansong

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribie

Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Purno
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo, Windy Dyah Indriantari

Kepala Sekretariat Redaksi: Eni Kartinah
Redaktur: Agus Mulyawan, Akhmad Mustain, Aries Wijaksana, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Denny Parsaulian Sinaga, Heryadi, Indrastuti, Ivan Sihombing, Mirza Andreas, Stria Hamid

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Atalya Puspita, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Fathurrozaq, Ferdian Ananda Majni, Gana Buana, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Inha Firdausya, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Iqbal Al Machmudi, Mohamad Farhan Zhuhri, Permana Pandega Jaya, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviany, Rahmatul Fajri, Ramdani, Rifaldi Putra Irianto, Siti Retno Wulandari, Suryani Wandari Putri Pertiwi, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Iis Zalnika
Redaktur: Eni Kartinah

CONTENT ENRICHMENT
Periset: Desi Yasmimi S, Gurit Adi Suryo,
Bahasa:
Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho,

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi:
Redaktur: Annette Natalia, Briyanbodo Hendro, Marionandes NKR
Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Dedy, Duta Amarta, Nurul Arohmat, Seno Aditya, Tutik Sunarsih
Olah Foto: Ade Rian H

BISNIS & PENGEMBANGAN
Direktur Bisnis & Pengembangan: G. Bernhard Rotinsulu
Kepala Divisi Sales & Marketing: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; **Surabaya:** (031) 5667359;
Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORESPONDEN
Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang)
Syarif Oesbaidillah (Tangerang Selatan)
Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), Naviandri, Sugeng Sumaryadi (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Kristiadi (Tasikmalaya)
Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Widjajadi (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebese)
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi,
Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura)
Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie),
Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar), Yoseph Pencawan (Medan), Januari Hutabarat (Taput)

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)
Kepri: Hendry Kremer (Batam),
Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekan Baru)
Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang)
Bengkulu: Marlansyah
Jambi: Solmi
Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya)
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarماسin)
Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu)
Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar)
NTB: Yusuf Riaman (Matararam)
Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta)
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang)
Papua: Marcellinus Kelen (Jayapura)
Papua Barat Daya: Martinus Solo

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303
Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110
Fax Customer Service: (021) 5820476,
Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp112.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520,

Telepon: (021) 5812088 (Hunting),
Fax: (021) 5812105 (Redaksi)
e-mail: redaksi@mediaindonesia.com,
Percetakan: Gramedia
Alamat: Jln. Palmerah Selatan 22-28 Jakarta Pusat 10270
Website: www.gramediaprinting.com

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, PERTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU WERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

PENGANTAR

MULAI 9 Maret 2022, tulisan di halaman Opini yang terbit setiap Rabu merupakan sinergi antara *Media Indonesia* dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menyajikan artikel opini dari para intelektual dan aktivis Muhammadiyah dengan berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912 merupakan gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid yang bersumber pada Quran dan *as-sunnah*. Sinergi ini merupakan bentuk peran media dalam mendukung terwujudnya gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan, melalui pembangunan tata sosial, dan pendidikan masyarakat yang lebih baik.



Edy Kuscahyanto
Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PERUNDUNGAN SIBER

Kasus perundungan yang marak di lingkungan pendidikan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter anak. Fenomena perundungan serta paparan konten negatif di internet menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak.

Laporan terbaru yang dirangkum oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dari Januari hingga awal Desember 2025 melalui kanal pengaduan FSGI, pemberitaan media massa, dan kasus-kasus yang viral di media sosial, jumlah kasus kekerasan di sekolah menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 15 kasus di 2023 menjadi 36 kasus pada 2024, dan kini 60 kasus di 2025.

Peristiwa ledakan pada sebuah SMA di Jakarta, yang dilakukan salah satu murid di sekolah itu—diduga akibat *cyber-bullying* (perundungan siber)—makin menunjukkan kaitan erat antara aksi tersebut dan paparan negatif medsos. Meningkatkan kekerasan di sekolah akibat perundungan siber ini sangat merisaukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Dalam kesempatan berbicara pada forum Konferensi Umum Ke-43 UNESCO di Samarkand, Uzbekistan, Abdul Mu'ti mengemukakan pentingnya 'kesalehan digital' itu. Dalam pidatonya ia menyebut Indonesia terus mengembangkan kebijakan *open science* serta mendukung upaya penerapan etika kecerdasan artifisial dan kesalehan digital agar transformasi digital tetap berpihak pada manusia dan menghormati martabatnya (*Media Indonesia*, 12/11/25).

Indonesia menghadapi darurat dalam melindungi anak dan remaja di ruang digital. Perundungan siber perlu menjadi program prioritas lintas kementerian—tidak hanya Kemendikdasmen, tetapi juga Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan penting Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan beberapa langkah konkret di lapangan dari pendekatan normatif ke pendekatan praktis dari tiga ruang utama: ruang sekolah, ruang digital, dan ruang keluarga.

TUJUH JURUS GURU BK

Dari ruang sekolah, Kemendikdasmen memprogramkan penguatan layanan dukungan psikologis di sekolah dengan memperkuat guru bimbingan konseling (BK) yang mampu mengenali perubahan perilaku dan mental setiap anak didik yang mengarah pada ketertutupan dan ketertarikan pada kekerasan.

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) meluncurkan program Pengembangan Kompetensi Bimbingan dan Konseling (BK) dalam bentuk Bimbingan Teknis Fasilitator Nasional Program Pengembangan Kompetensi BK untuk Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini menjadi langkah strategis mendorong pemahaman dan praktik konseling yang lebih komprehensif dan relevan dengan murid untuk guru BK di seluruh Indonesia melalui pendekatan Tujuh Jurus BK Hebat.

Program tersebut mencakup tujuh komponen, yaitu kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ketujuh jurus ini dikembangkan dalam bentuk modul yang sederhana, mudah dipahami,

dan aplikatif bagi guru di berbagai jenjang. Saat ini terdapat 1.200 fasilitator nasional dari unsur guru BK, kepala sekolah, pengawas, dan dosen, serta 18.000 fasilitator daerah yang seluruhnya merupakan guru BK aktif di seluruh jenjang.

Berdasarkan data Oktober 2025, sebanyak 18.166 guru BK telah mengikuti pelatihan program BK Kemendikdasmen, atau sekitar 25,32% dari total 71.756 guru BK nasional. Fasilitator nasional dan daerah ditargetkan dapat mengimbaskan program ini kepada 270.000 guru, termasuk guru BK, guru mata pelajaran, dan guru kelas. Mereka akan menjadi penggerak utama pengimbasan di wilayah masing-masing.

KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Salah satu inisiatif utama dalam implementasi strategi ini ialah penguatan literasi digital, koding, dan kecerdasan artifisial (KA) dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing

sumber daya manusia Indonesia di tingkat global, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Integrasi koding dan KA dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan literasi digital dan kemampuan penyelesaian masalah, tetapi juga mengajarkan berbagai keterampilan yang mencakup berpikir komputasional, analisis data, algoritma pemrograman, etika, dan teknik KA. Berpikir komputasional mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien.

Pada tingkat SD, pendekatan berbasis permainan dan pembelajaran *unplugged* (tidak menggunakan perangkat digital) dapat digunakan untuk mengenalkan dasar-dasar berpikir komputasional, sekaligus pengenalan dan memahami etika digital. Di tingkat SMP, pembelajaran lebih diarahkan pada pemrograman berbasis blok, eksplorasi algoritma sederhana, dan pengenalan konsep KA dalam kehidupan

sehari-hari. Sementara di SMA dan SMK, peserta didik mulai diperkenalkan pada pemrograman berbasis teks, konsep *machine learning*, serta aplikasi KA dalam berbagai bidang industri.

Dengan pendekatan yang bertahap dan kontekstual, peserta didik tidak hanya memahami teori dan etika digital, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proyek nyata yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah keseharian.

BATAS USIA DI RUANG DIGITAL

Ruang digital menjadi rumah singgah tempat murid memperoleh penguatan informasi yang disukai, bekerja sebagai ruang gema tanpa konter-narasi. Ruang digital ini tentu menjadi ranah pemerintah untuk mengaturnya, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Pernah ada wacana pembatasan usia anak menggunakan media sosial.

Dalam hal pembatasan usia

murid, ada baiknya belajar dari negara tetangga yakni Australia. Akhir tahun 2025 ini Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang secara hukum melarang remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Kebijakan ini tertuang dalam *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024*. Pemerintah Australia menetapkan bahwa platform seperti *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *X*, dan *Snapchat* harus mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun. Bila melanggar, dikenai denda hingga A\$49,5 juta.

Terkait dengan pembatasan usia tersebut, para kritikus di Australia menilai hal itu tidak tepat. Perlu platform yang lebih seimbang, efektif, dan sesuai hak asasi, yakni dengan mengatur algoritma untuk memperkuat verifikasi usia dengan privasi. Perlindungan atas kesejahteraan psikologi remaja adalah alasan utama pemerintah Australia melakukan pembatasan usia, sebagai komitmen dalam mendukung orangtua dan melindungi remaja.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah Indonesia, berapa batasan usia anak di ruang digital? Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), pemerintah menetapkan batasan usia anak untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.

Pemerintah membatasi usia anak dalam mengakses media sosial dan layanan digital untuk ciptakan ruang digital aman dan ramah bagi anak-anak. Untuk usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak, dan itu pun harus disertai izin orangtua.

Menerapkan kebijakan seperti Australia di Indonesia menghadapi banyak kerumitan. Salah satu kendala ialah infrastruktur verifikasi usia digital di Indonesia masih belum merata. Banyak remaja tidak memiliki identitas digital formal sehingga penerapan pemeriksaan usia bisa sulit dan diskriminatif.

LITERASI DIGITAL DI RUANG KELUARGA

Bukan tidak mungkin perilaku konsumsi medsos remaja itu muncul karena mencontoh orangtua mereka. Literasi digital terhadap orangtua pun tidak kalah penting supaya lebih *nyambung* ketika berbicara dengan anak tentang dunia maya, untuk memastikan anak-anak mereka menggunakan medsos secara positif.

Orangtua bisa menggunakan aplikasi yang sering digunakan, yakni Google Family Link. Aplikasi itu memungkinkan orangtua bisa mengatur durasi penggunaan gawai serta konten apa yang dapat mereka akses. Orangtua akan lebih paham tentang bagaimana algoritma bekerja. Sebagai contoh, orangtua dapat mengetahui video apa yang sering diakses anak-anak, bagaimana mengacak algoritma itu. Dengan literasi digital yang baik, bisa mengajarkan kepada anak bagaimana menjaga algoritma media sosial tetap pada konten-konten positif.

Gerakan literasi digital orangtua bisa dilakukan melalui pelatihan dan penyediaan buku panduan bagi orangtua untuk secara bersama mengontrol serta mengatur batas waktu dan jenis konten. Pelatihan bisa dimulai dari kelompok kecil di tingkat RT/RW, komunitas pengajian, orangtua murid.

Mengingat lebih dari 81 juta penduduk Indonesia adalah kelompok usia sekolah, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan berkaitan langsung dengan masa depan bangsa. Karena itu, upaya menamatkan kesalahan digital di kalangan murid perlu dukungan bersama.





PEMBANGUNAN SEKOLAH: Pekerja membersihkan bagian lantai untuk dilakukan pengecoran sekolah sementara di Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Senin (26/1). Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membangun sekolah sementara bagi 60 siswa SDN 09 Bancah yang gedung sekolahnya rusak akibat banjir bandang pada November 2025.



ANTARA/IGGOY EL FITRA

Sekolah di Lokasi Bencana Diutamakan

- Tahun ini dianggarkan Rp11 triliun untuk 12 ribu satuan pendidikan.
- Khusus Aceh, Mendikdasmen telah menandatangani 49 perjanjian kerja sama.
- Kemendikdasmen menyampaikan 78,4% masyarakat puas dengan program revitalisasi sekolah.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PADA 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan sekolah terdampak bencana akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. "Prioritas kami di 2026 ialah sekolah yang memang rusak, bukan sekolah yang misalnya penambahan-penambahan atau rehab-rehab kecil. Kalau rehab kecil, bisa dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tidak perlu dari revitalisasi," tuturnya, Selasa (20/1) lalu.

Karena itu, pada tahun ini untuk 12 ribu satuan pendidikan telah dianggarkan sekitar Rp11 triliun. "Untuk sementara sudah ada anggaran bagi sekitar 12 ribu satuan pendidikan. Dalam pidato Hari Guru, Presiden Prabowo berjanji menambah 60 ribu," tegas Abdul Mu'ti.

Data sementara Kemendikdasmen per 14 Januari 2026 terdapat 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi. Sebanyak 4.440 sekolah (96%) sudah dapat digunakan kembali.

Selain itu, bencana juga berdampak pada 59.397 guru serta 683.259 siswa lantaran proses belajar mengajar mereka terganggu. Mengenai tingkat kerusakan, tercatat 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, dan 180 sekolah mengalami rusak total.

TEKEN 49 PKS

Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah menandatangani 49 perjanjian kerja sama (PKS) sebagai upaya mempercepat pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh. Ia mengatakan penandatanganan 49 PKS tersebut dilakukan pada 15 Januari

setelah dinas pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sebagian laporan yang masuk tentang daftar sekolah terdampak bencana beberapa waktu lalu.

"Proses penandatanganan PKS akan terus dilaksanakan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dengan proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Kamis (22/1).

Dari 49 PKS tersebut, 3 untuk perbaikan PAUD, 28 untuk perbaikan SD, 10 untuk perbaikan SMP, dan 8 untuk perbaikan SMA, dengan keseluruhan nilai dana bantuan PKS ialah Rp54 miliar.

Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya mencatat ada sekitar 2.461 sekolah yang sedang dalam tahap verifikasi dan validasi data oleh dinas pendidikan, dengan jumlah satuan pendidikan SD terbanyak, yakni 911 sekolah. Adapun jumlah keseluruhan sekolah yang dilaporkan terdampak bencana alam di Provinsi Aceh tersebut berjumlah 2.780.

APRESIASI

Sebelumnya, pada rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Selasa (20/1), Ketua Komisi X DPR, Hefifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasinya atas langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya telah dilakukan, antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa. Dia pun mendorong pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan gedung sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Hefifah pun menekankan penting-

Rehabilitasi Sekolah di Daerah Terdampak Banjir Sumatra

Sejumlah Langkah Rehabilitasi

- Membersihkan dan mengumpulkan data sekolah yang rusak.
- Memverifikasi secara langsung kerusakan sekolah.
- Menyetujui bantuan untuk sekolah, antara lain senilai Rp54,5 miliar di Aceh.
- Menyalurkan dana rehabilitasi 1-2 minggu setelah persetujuan.
- Menyiapkan lokasi untuk relokasi sekolah yang rusak berat.



Anggaran rehabilitasi:
Rp5,03 triliun

Bantuan Pendukung Rehabilitasi

- 27.000 unit peralatan sekolah.
- 168 tenda pembelajaran darurat.
- 147 ruang kelas darurat.
- 147.670 buku.
- 1.339 sekolah mendapat dana operasional.
- 680 sekolah mendapat dukungan psikososial.

Dampak Bencana di Bidang Pendidikan

Sekolah Terdampak	Siswa Terdampak	Guru Terdampak
<ul style="list-style-type: none"> • Aceh: 2.805 • Sumut: 1.261 • Sumbar: 483 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh: 362.617 • Sumut: 214.288 • Sumbar: 80.288 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh: 34.081 • Sumut: 15.774 • Sumbar: 7.072
Total: 4549	Total: 657.193	Total: 56.882

Sumber: Kemendikdasmen/Litbang MI

nya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (hunting). "Akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi X lainnya, Sofyan Tan, menginformasikan bahwa banyak sekolah di Aceh Utara masih belum berfungsi karena ruang kelas ada tapi belum bersih, perabot hilang, endapan lumpur tinggi, juga semua sarana dan prasarana hancur.

MASYARAKAT PUAS

Kemendikdasmen menyampaikan 78,4% masyarakat memberikan penilaian baik terkait dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) kategori revitalisasi satuan pendidikan. Di-

rektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan angka tersebut merupakan hasil survei Arus Survey Indonesia (ASI).

"Wujud nyata komitmen tersebut kami buktikan dengan pencapaian di atas target. Pencapaian memuaskan juga tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Semula target hanya 98,2, naik menjadi 2.000 sekolah," kata Gogot di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Dirjen Gogot menambahkan, selain berdampak pada sektor pendidikan, perwujudan PHTC revitalisasi satuan pendidikan sejatinya juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat lokal. (Ant/H-1)

Kondisi Sekolah di Aceh Menyedihkan

SUDAH dua bulan berlalu banjir melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, kondisi penyintas bencana tidak jauh berubah. Bukan saja rumah yang terseret banjir dan aktivitas perekonomian yang lumpuh, fasilitas pendidikan putra-putri mereka pun berantakan.

Dari penelusuran *Media Indonesia*, Sabtu (24/1), di SD Negeri Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, meskipun proses belajar mengajar (PBM) sudah dimulai sejak 5 Januari, kondisinya masih cukup menyedihkan. Sekolah darurat yang dibangun di bawah tenda putih bantuan UNICEF— melalui program Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah—masih serbakrisis dan mengharukan.

Pemerintah seperti abai karena sekolah itu jauh di balik lumpur banjir dan terhalang gelondong atau kayu batangan yang terbawa banjir. Mulai dari fasilitas sekolah, keadaan murid, hingga nasib guru, laksana hidup di rimba. Dari enam kelas di sekolah tenda itu, hanya tiga kelas yang memiliki papan tulis.

"Baru ada tiga papan tulis manual pakai spidol. Hendaknya ada sumbangan atau bantuan donasi tiga papan tulis lagi untuk kelancaran belajar anak-anak kami," tutur Akhmad, Kepala SD Negeri Babo, kepada *Media Indonesia*, Sabtu (24/1).

Siswa juga harus duduk lesehan

dengan alas terpal. Anak-anak hanya menggunakan meja lipat kecil untuk menulis sambil duduk lesehan. Bukan hanya murid, guru juga tidak punya meja dan kursi.

Saat hujan deras, alas plastik di lantai tanah itu menjadi lembap. Suara air hujan pada atap terpal menambah ketidaknyamanan kegiatan belajar mengajar. Saat terik matahari, udara terasa sangat panas hingga keringat bercucuran membasahi baju mereka. "Makanya kalau sudah pukul 10.00 WIB, cuaca sudah panas. Jam belajar pun segera diakhiri. Anak diperbolehkan pulang," ujar Akhmad.

Seragam, tas, alat tulis, dan meja lipat yang mereka gunakan adalah sumbangan dari Namira Islamic

Shool Medan, Sumatra Utara. Adapun fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK) dan koneksi internet Starlink merupakan bantuan dari Pondok Sedekah Indonesia dan Komunitas Offroad Weekdays Adventure Indonesia (Indonesia Offroad Federation/IOF).

Budayawan dari Universitas Syiah Kuala (USK), M Adli Abdullah, mengatakan dunia pendidikan hal yang harus segera dipulihkan. Mengabaikan pendidikan berarti membiarkan kebodohan generasi bangsa. "Rasul menegaskan, pendidikan merupakan kewajiban mutlak, berlangsung semur hidup dari buaian hingga liang kubur, dan itu jalan menuju surga," tutur Adli. (MR/H-1)

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini:

PT Tombal Jaya Sirtu, berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ("Perseroan"), mengumumkan rencana pengambilalihan atas saham dalam Perseroan, sehingga akan terjadi perubahan pengendalian pemegang saham Perseroan ("Pengambilalihan").

Bagi kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.

Kota Palu, 28 Januari 2026
Direksi
PT Tombal Jaya Sirtu



AGENDA | RABU, 28 JANUARI 2026

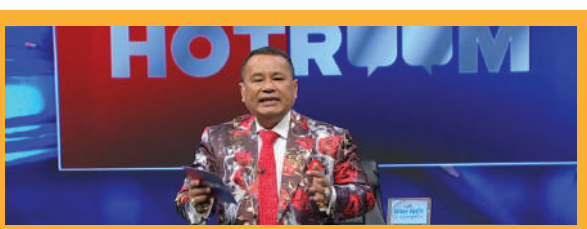
METRO HARI INI | 16.05 WIB

Ada banyak berita datang dan pergi dalam sehari, ada yang begitu menyita perhatian, ada informasi yang mudah sekali untuk didapatkan. Karena kami menyadari waktu Anda teramat berharga, beragam berita dalam sehari tersebut kami pilih mana yang terbaik ataupun yang terhangat untuk disuguhkan dalam *Metro Hari Ini*. Jadi, pastikan Anda tetap terinformasi bersama kami.



HOTROOM | 21.05 WIB

Hotroom adalah program gelar wicara yang dipandu oleh Hotman Paris Hutapea. Di Hotroom, Hotman Paris Hutapea akan membahas seluk-beluk kasus yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Mendatangkan beberapa narasumber kompeten dari kedua belah pihak, sehingga berimbang dan masalah akan terlihat lebih jelas. Apa yang akan dibahas Hotroom kali ini?





Zona Delapan Besar Membara



AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND

DUEL SENGIT: Bek Union St-Gilloise Kevin Mac Allister (kanan) dan penyerang Bayern Muenchen Luis Diaz memperebutkan bola dalam pertandingan sepak bola UEFA Champions League antara FC Bayern Muenchen (Jerman) dan Royale Union St-Gilloise (Belgia) di Muenchen, Jerman selatan, pada Rabu (21/1).

- Muenchen masih berpeluang jadi juara fase liga.
- City akan tampil tanpa para pemain andalan.
- Liverpool tetap berpeluang lolos otomatis.

KHOERUN NADIF RAHMAT
khoerun@mediaindonesia.com

FASE liga Liga Champions mencapai titik klimaks. *Matchday* terakhir yang dimainkan serentak dini hari WIB nanti menjadi malam penentuan bagi puluhan klub elite Eropa. Fokus utama tertuju pada perebutan zona delapan besar, zona emas yang memastikan tiket langsung ke babak 16 besar.

Satu kesalahan kecil dapat memaksa tim papan atas melewati jalur *play-off* yang melelahkan, atau bahkan terjungkal lebih awal.

Bayern Muenchen menjadi salah satu tim yang ingin mengamankan posisi tanpa bergantung pada hasil pihak lain. Saat bertanding ke markas PSV Eindhoven, 'Die Roten' memburu kemenangan demi mengunci dua besar klasemen fase liga. Meski kini bertengger di peringkat kedua dengan 18 poin, tekanan belum sepenuhnya hilang. Selisih dengan Real Madrid dan Liverpool masih cukup tipis untuk membuat posisi Muenchen rawan tergeser.

"Dalam periode sibuk dengan jadwal lima pertandingan dalam 13 hari, segala hal bisa terjadi. Kami harus tetap fokus," kata pelatih Bayern Vincent Kompany seperti dikutip dari laman resmi klub.

Kemenangan juga bernilai strategis bagi Muenchen untuk menegaskan status mereka sebagai salah satu lini serang paling produktif musim ini dengan koleksi 20 gol. Enam kemenangan tandang beruntun turut menjadi modal penting menghadapi PSV yang tertekan karena masih terceder di luar zona aman.

TEMUKAN LAGI RITME

Di Portugal, Real Madrid menghadapi laga krusial saat bertanding ke

Estadio da Luz untuk menghadapi Benfica. 'Los Blancos' datang dengan misi menembus delapan besar sekaligus memastikan tiket otomatis ke babak 16 besar. Meski sempat diguncang pergantian pelatih, Madrid perlahan menemukan kembali ritme dengan tiga kemenangan beruntun.

Kapten Madrid Federico Valverde menegaskan pentingnya laga itu. "Lini depan tim kami sangat berbahaya. Bola apa pun yang mengarah ke mereka, dengan ruang terbuka dan menghadap gawang, mereka bisa menciptakan peluang mencetak gol," ujar Valverde.

Ia menambahkan, "Tetap tenang dan incar tiga poin di Portugal agar kami bisa masuk ke posisi delapan besar dan bisa beristirahat untuk beberapa pertandingan."

DIHANTAM BADAI CEDERA

Tekanan lebih berat dirasakan Manchester City. 'The Citizens' turun ke peringkat ke-11 dan terlempar dari zona delapan besar akibat kekalahan mengejutkan dari Bodo/Glimt. Saat menjamu Galatasaray di Etihad, City wajib menang dan berharap hasil laga lain berpihak.

Juru taktik City Pep Guardiola menegaskan betapa krusialnya posisi delapan besar di tengah krisis personel yang melanda timnya.

"Kami butuh pendukung kami. Marc (Guehi) tidak bisa bermain, Antoine (Semenyo) tidak bisa bermain, Rodri tidak bisa bermain, selain semua pemain yang ada di pinggir lapangan (cedera)," ujar Guardiola.

"Nico tidak akan siap. Savinho tidak akan siap, Stones tidak akan siap. Daftar yang panjang, tapi semoga tribun kami bisa mendorong kami untuk mencobanya," imbuhnya.

Meski demikian, Guardiola tetap menegaskan target timnya.

“Klub seperti Liverpool terbiasa bermain tiga kali seminggu, tetapi faktanya saat ini kami harus mengelola menit bermain pemain karena badai cedera panjang.”

Arne Slot
Pelatih Liverpool

"Tentu saja kami ingin finis di delapan besar. Kami harus memenangi pertandingan kami dan menunggu apa yang terjadi," tutupnya.

TRADISI LOLOS OTOMATIS

Pertarungan langsung sesama penghuni papan atas tersaji di Paris, ketika Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Newcastle United. Kedua tim sama-sama mengoleksi 13 poin dan masih berada di zona delapan besar. Namun, posisi tersebut masih rapuh. Kekalahan bisa menyeret salah satu ke jalur *play-off*.

Bagi PSG, kemenangan di kandang menjadi harga mati demi memperpanjang tradisi lolos otomatis ke fase gugur.

"Sangat penting bagi kami untuk menang demi menjaga tekanan. Kami tahu memenangi setiap pertandingan itu sulit, tapi kami harus tetap tenang dan siap untuk Rabu (Kamis WIB)," ujar pelatih PSG Luis Enrique.

WILLIAN JADI TUMPUAN

Di Naples, Chelsea juga menjalani malam penuh ketegangan. 'The Blues' kini berada tepat di peringkat kedela-

pan, batas terakhir zona otomatis. Saat mereka bertanding ke markas Arsenal, kemenangan menjadi harga mati karena selisih gol berpotensi menentukan.

Pelatih Chelsea Liam Rosenior menyoroti peran pemain mudanya, Estevao Willian.

"Ia talenta spesial. Tugas kami mengelola menit bermainnya dengan tepat agar ia bisa terus memberikan dampak besar bagi tim," ujar Rosenior.

LINI BELAKANG MERAGUKAN

Barcelona menghadapi tekanan besar karena masih tertahan di peringkat kesembilan. 'Blaugrana' wajib menang atas FC Copenhagen sambil berharap pesaing terpeleset. Produktivitas tinggi belum sepenuhnya menutupi masalah di lini belakang.

Hansi Flick menyoroti perkembangan dua anak asuhnya jelang laga penentuan.

"Olmo sangat penting dalam mengontrol bola dan memberikan assist. Eric, di posisi mana pun ia bermain, ia selalu tampil di level tertinggi," ujar Flick seperti dikutip dari laman resmi klub.

BUTUH SATU KEMENANGAN

Liverpool juga berada di jalur perebutan delapan besar. 'The Reds' hanya membutuhkan satu kemenangan atas Qarabag di Anfield untuk memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Namun, Arne Slot mengingatkan kondisi tim yang tidak sepenuhnya ideal akibat badai cedera.

"Klub seperti Liverpool terbiasa bermain tiga kali seminggu, tetapi faktanya saat ini kami harus mengelola menit bermain pemain karena badai cedera panjang. Kami harus realistis dengan kondisi energi tim," ujar Slot. (I-3)

Satu Malam Menentukan Segalanya

BAGI banyak klub, laga pamungkas fase liga Liga Champions menjadi pertempuran hidup-mati. Hasil apa pun yang didapat bisa menentukan apakah musim Eropa berlanjut atau berakhir lebih cepat daripada yang direncanakan.

Benfica menjadi salah satu tim yang paling terjepit. Ketika menjamu Real Madrid di Estadio da Luz, dini hari nanti WIB, 'the Eagles' berada di peringkat ke-29 dan terpaut dua poin dari zona *play-off*. Situasi itu membuat laga kontra 'Los Blancos' berubah menjadi partai wajib menang, sambil berharap hasil dari stadion lain memihak mereka.

Tim asuhan Jose Mourinho itu sempat membangkitkan asa lewat kemenangan atas Ajax dan Napoli. Namun, kekalahan 0-2 dari Juventus, pekan lalu, kembali menyeret mereka ke tepi jurang. Secara historis, Benfica memiliki memori manis atas Madrid, termasuk kemenangan di final 1961-1962. Namun, inkonsistensi membuat peluang mereka sulit ditebak.

“Bagi Napoli, laga itu bukan hanya soal poin, melainkan juga tentang mempertahankan wibawa di hadapan publik sendiri sekaligus menghindari eliminasi memalukan di kompetisi elite.”

Tekanan serupa juga menyelimuti PSV Eindhoven. Meski PSV perkasa di kompetisi domestik dan unggul jauh di puncak liga, kiprah Eropa mereka justru rapuh. Kekalahan 0-3 dari Newcastle United melanjutangi problem di sektor pertahanan. Dengan posisi ke-22, PSV harus memaksimalkan laga kandang melawan Bayern Muenchen demi menjaga peluang bertahan di zona *play-off*.

Napoli saat ini berada dalam kondisi jauh lebih kritis. 'Partenopei' terpuruk di peringkat ke-25 dan terancam

tersingkir. Dalam menjamu Chelsea, mereka setidaknya wajib menghindari kekalahan agar asa tetap menyala.

Pelatih Napoli Antonio Conte menegaskan timnya belum menyerah meski berada di bawah tekanan berat.

"Saya memiliki tim yang serius dan selalu memberikan yang terbaik. Saya bangga dengan komitmen mereka dan kami melangkah maju dengan keyakinan penuh," kata Conte seperti dikutip dari laman resmi klub.

Bagi Napoli, laga itu bukan hanya soal poin, melainkan juga tentang mempertahankan wibawa di hadapan publik sendiri sekaligus menghindari eliminasi memalukan di kompetisi elite.

Sementara itu, Qarabag FK dan FC Copenhagen datang membawa misi berbeda. Qarabag berkunjung ke Anfield dengan modal kejutan sesuai menumbangkan Eintracht Frankfurt. Meski secara tradisi kalah kelas, hasil imbang 2-2 kontra Chelsea sebelumnya menunjukkan mereka bukan sekadar penggembira.

Copenhagen pun demikian. Wakil Denmark itu masih memiliki peluang menembus zona *play-off*. Namun, minimnya laga kompetitif akibat jeda musim dingin berpotensi menjadi kendala besar saat bertanding ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona yang haus kemenangan.

ALARM UNTUK ARSENAL

Di London Utara, Arsenal justru berada di kutub berbeda. 'The Gunners' sudah memastikan kelolosan dan hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci status juara fase liga. Namun, kekalahan domestik terakhir menjadi alarm bahwa dominasi Eropa tidak otomatis menjamin stabilitas performa.

"Kami berada di bawah standar, terutama dalam performa individu. Dalam sepak bola, terkadang Anda dihukum karena kesalahan itu. Kami tahu apa yang dibutuhkan pemain dan kami akan bermain jauh lebih baik di laga nanti," ujar Mikel Arteta seperti dikutip dari laman resmi klub.

Bagi Arsenal, laga terakhir menjadi momen mengembalikan kepercayaan diri sebelum fase gugur. (Ndf/I-3)



AFP/MARCO BERTORELLO

BEREBUT BOLA: Penyerang Napoli Rasmus Hojlund (kanan) berebut bola dengan bek Juventus, Bremer, dalam pertandingan sepak bola Seri A Italia antara Juventus dan Napoli di Stadion Allianz, Turin, pada Minggu (25/1).

REZA RAHADIAN

Film Suzzanna, Kisah Manusia yang Tertindas

AKTOR sekaligus sutradara Reza Rahadian kembali bergabung dalam proyek film *Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa*. Setelah 15 tahun tak masuk genre itu, kini ia ikut terlibat karena film tersebut tak sekadar menakut-nakuti penonton. Reza melihat film *Suzzanna* menawarkan kisah yang lebih dalam tentang manusia, luka batin, dan perlawanan terhadap kekuasaan.

"Yang membuat saya tertarik karena cara film ini memosisikan *Suzzanna* bukan semata sebagai sosok menyeramkan, melainkan sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang tertindas. Manusia yang terluka, lalu mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa dampaknya," kata Reza dalam Press Conference Official Trailer Launching film *Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa*, Senin (26/1).

Tema perlawanan terhadap kekuasaan menjadi elemen yang paling menggugah minatnya. Konflik tersebut dinilai relevan dengan realitas sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia sehingga menjadikan film itu bukan hanya tontonan hiburan, melainkan juga ruang refleksi. Bagi Reza, horor dalam film itu hadir sebagai konsekuensi, bukan tujuan utama.

Ia bahkan mempertanyakan kembali batasan genre itu sendiri. "Is it a horror film? In a way, iya. Tapi di sisi lain, ini cerita tentang manusia," ujarnya.

Melalui film itu, Reza tidak hanya menandai keulangannya ke genre horor, tetapi juga ikut memperluas maknanya. Teror tak lagi sekadar alat untuk menakut-nakuti, tetapi juga medium untuk membeberarkan manusia, tekanan, dan keberanian melawan ketidakadilan. (*/M-2)



MI/RAMDANI

TONE STITH

AI di Dunia Musik sekadar Alat Bantu

PENYANYI R&B sekaligus penulis lagu Tone Stith mengungkapkan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) di dunia musik bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, Stith merasa terbantu karena bisa dipakai untuk menuntaskan beberapa pekerjaan sekaligus, terutama demo lagu. Ia bisa menyesuaikan keinginan klien dengan data suara jika dibandingkan dengan harus mengulang rekaman suara berkali-kali.

"Aku agak bingung soal ini karena, ya, sebagai seorang penyanyi, penulis (lagu), dan produser, aku sekarang lihat manfaat pakai AI," ucap Stith dalam wawancara eksklusif dengan *Medcom*.

"Misalnya, seperti kalau AI pelajari suaraku dan aku punya lagu-lagu yang dibutuhkan buat demo banyak artis lain atau siapa pun, menurutku itu cara bagus untuk menyimpan suaramu," imbuhnya.

Sementara itu, di sisi lain, ia juga khawatir jika suara yang sudah terekam dan masuk dalam data AI bisa disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Musikus 30 tahun itu mengatakan ketidaksiannya jika AI digunakan untuk semua pekerjaan karena tidak akan memunculkan kreativitas pribadi.

Ia menyarankan agar para pencipta karya hanya memanfaatkan kecerdasan buatan sebatas alat pencari ide dan mengeluarkan kreativitas. Ia tidak setuju jika orang-orang menggunakan AI untuk kerja sepenuhnya.

"Jadi, menurutku, kalo kamu pakai AI sebagai alat buat membantu berkarya, aku rasa (AI) itu ramah," tuturnya. (medcom.id/M-2)



AFP/GETTY IMAGES/CAROL LEE ROSE

NUR ALIA HARAHAP & MUARA MARATAGOR SIREGAR

Menghibahkan Kebun, Menanam Masa Depan

- Lahan seluas 7.500 meter persegi dihibahkan untuk dibangun MTs negeri.
- Lahan dibeli secara pribadi dengan mengandalkan gajinya sebagai guru.
- Sejak 2011, MTs tersebut sudah menerima murid.

JANUARI HUTABARAT
januari@mediaindonesia.com

TIDAK semua kekayaan dapat diukur dengan harta benda. Bagi Nur Alia Harahap, 58, dan sang suami Muara Maratagor Siregar, 68, kekayaan sejati ialah ketika ilmu pengetahuan dapat diwariskan kepada generasi muda meski harus dibayar dengan pengorbanan besar.

Di atas lahan seluas sekitar 7.500 meter persegi, yang dulu dipenuhi oleh lebih dari 20 pohon durian dan kebun salak produktif, kini berdiri sebuah madrasah sanawiah (MTs) negeri. Sekolah itu menjadi tumpuan harapan ratusan anak desa untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Tanah tersebut bukan warisan keluarga, bukan pula bantuan pemerintah. Lahan itu dibeli seharga Rp70 juta dengan cara dicitil dari penghasilan Nur Alia sebagai guru, dan sang suami. Setelah lunas, tanah itu tidak diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi dihibahkan sepenuhnya tanpa ganti rugi demi berdirinya sekolah. "Saya tidak pernah merasa rugi. Sejak awal, tanah itu memang saya niatkan untuk madrasah," ujar Nur Alia Harahap saat ditemui bersama suaminya, Muara Maratagor Siregar, di kediaman mereka di Desa Sinyior, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (26/1).

Kebun yang dahulunya menjadi sumber penghidupan keluarga berubah menjadi ladang pengabdian, tempat anak-anak desa menimba ilmu dan harapan. Sejak 2011, MTs negeri tersebut mulai menerima murid baru.

BERAWAL DARI KEGAGALAN KEPONAKAN

Niat menghibahkan tanah itu bermula ketika sang keponakan gagal masuk MTs di Kota Padangsidimpuan akibat terbatasnya kuota siswa dari kecamatan. "Sejak saat itu, kami berdoa, 'jika Allah memberikan rezeki', kami ingin membeli tanah dan menyerahkannya untuk pendirian sekolah MTs di daerah ini," imbuh sang suami Muara Maratagor Siregar.

Dengan kerja keras dan kesabaran, doa itu terjawab. Meski saat tanah tersebut dihibahkan mereka tidak lagi memiliki lahan pertanian yang memadai, keduanya tidak pernah menyesal.



MI/JANUARI HUTABARAT

"Karena kami ikhlas, Allah justru membuka jalan. Kami bisa membeli lahan pertanian lain yang lebih baik," ungkap Maratagor.

TERPENTING ANAK-ANAK SEKOLAH

Ketekunan Nur Alia menjadi gambaran seorang pendidik yang pantang menyerah pada keadaan. Lulusan MAN PGA Sidimpuan pada 1990 itu pernah merantau sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi pada 1993-1995. Sekembalinya ke Tanah Air, ia mengajar sebagai guru honorer di Bagan Batu pada 1996.

Pada 2002, Nur Alia tercatat sebagai honorer pusat di SD Inpres Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan. Kemudian, pada 1 Januari 2005, Nur Alia resmi diangkat sebagai ASN melalui tes umum Departemen Agama (nama ketika itu).

"Saya terbiasa hidup sederhana. Yang penting anak-anak bisa sekolah," ucapnya singkat.

Dikaruniai delapan anak, kini mereka sudah meniti jalan mereka masing-masing. Empat di antaranya menjadi abdi negara, masing-masing berprofesi sebagai bidan, guru, pegawai KUA, dan anggota TNI. Tiga anak telah menikah dan berwirausaha, sementara anak bungsu Nur Alia masih duduk di kelas 1 sanawiah.

Tahun lalu, tepatnya pada Agustus, Nur Alia dipercaya menjabat sebagai kepala MTs Negeri 7 Kecamatan Angkola Barat. Sekolah yang ia pimpin itu berada jauh dari madrasah yang berdiri di atas tanah hibahnya. Meski sudah memiliki jabatan, Nur Alia tak mengubah gaya hidupnya, tetap tanpa kendaraan mewah dan rumah besar.

Kisah Nur Alia dan suami menjadi cermin bahwa pendidikan tidak selalu dibangung dengan kemewahan, tetapi juga dengan niat tulus dan keberanian berkorban. Sebab, satu kebun bisa habis, tetapi satu keikhlasan dapat menumbuhkan masa depan banyak generasi. (M-2)

ON THIS DAY - 28 JANUARI

1965: Maple Leaf Jadi Bendera Kanada

RATU Elizabeth II memproklamasikan penggunaan bendera baru tersebut pada 28 Januari 1965 dan secara resmi menggunakannya pada 15 Februari tahun yang sama, dalam suatu upacara resmi yang diadakan di Parliament Hill di Ottawa. Bendera baru tersebut dinaikkan dan hadirin bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Kanada.

Sebelum bendera dengan gambar daun maple itu dipilih menjadi bendera nasional Kanada, terdapat tiga pilihan bendera. Pertama, bendera Maple Leaf atau Daun Maple. Bendera itu terdiri atas dua warna, yaitu merah dan putih. Di tengahnya terdapat gambar daun maple merah. Kedua, yakni bendera Inggris St George's Cross yang dibawa oleh John Cabot pada 1497.

Bendera itulah pertama kali dikibarkan di Kanada. Bendera Inggris dikibarkan di Kanada sejak pendudukan Inggris pada 1621 di Nova Scotia. Ketiga, yaitu bendera merah dengan tanda salib putih, bendera nasional Prancis saat itu.

Pada 1964, Perdana Menteri Lester B Pearson membentuk sebuah komite untuk menyelesaikan perdebatan tentang perubahan bendera nasional Kanada. Dari tiga pilihan yang ada, terpilihlah bendera dengan daun maple merah rancangan George FG Stanley. Desain bendera tersebut didasarkan pada bendera Royal Military College of Canada.

1986: Tragedi Challenger



AFP

bakar padat akibat dinginnya suhu sewaktu peluncuran. Kejadian itu mengakibatkan reaksi berantai yang menghasilkan ledakan masif. Meledaknya Challenger menjadikan NASA tidak mengirim para astronot mereka ke angkasa selama kurun waktu dua tahun.

Penerbangan Challenger sebelumnya telah mengalami beberapa kali penundaan. Awalnya pesawat itu direncanakan terbang pada 22 Januari 1986. Namun, cuaca buruk menjadi pertimbangan untuk menundanya hingga 28 Januari. Angin kencang di Florida dan es menyelimuti bagian dalam pangkalan udara. Tragedi Challenger menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah penerbangan antariksa Amerika Serikat. Insiden itu telah mengguncang kepercayaan publik terhadap program luar angkasa NASA.

PESAWAT ulang-alik Challenger berangkat dari Tanjung Canaveral, Florida, dan tujuh astronot asal Amerika, orang-orang pertama AS yang pergi ke angkasa. Tujuh puluh tiga detik setelah keberangkatan, pesawat meledak. Pihak keluarga dan kerabat awak pesawat menyaksikan ledakan. Tak hanya itu, jutaan warga AS pun melihatnya melalui siaran televisi.

Setelah diadakan penyelidikan, penyebab meledaknya pesawat ulang-alik tersebut ialah kegagalan fungsi alat pengaman pada satu dari dua roket berbahan

2002: Gudang Senjata di Nigeria Meledak

SEDIKITNYA 580 jenazah diangkat dari sebuah kanal di Lagos, Nigeria. Mereka tenggelam setelah terjadi ledakan di kota tersebut pada sore hari sebelumnya. Para pejabat setempat membenarkan apa yang mereka sebut sebagai 'insiden besar' di kanal yang terletak di Distrik Isolo itu. Namun, mereka menolok untuk memperkirakan jumlah yang tewas.



BBC.CO.UK

Ibu kota Nigeria yang merupakan permukiman padat itu ditempati oleh lebih dari 10 juta jiwa, dikejutkan ledakan besar berkali-kali, yang datang dari gudang senjata besar yang terletak di Barak Militer Ikeja. Ledakan tersebut begitu menakutkan dan memaksa ribuan massa menyelamatkan diri ke arah kanal. Seorang fotografer mengaku menyaksikan hanya dalam 1 jam 140 jenazah sudah diangkat dari air. Begitu ditemukan, jenazah-jenazah itu segera dibawa pergi oleh regu penolong.

Ledakan tersebut juga menyebabkan kerusakan parah di sekitar Barak Militer Ikeja. Ratusan rumah hancur, atap bangunan beterbangan, dan kaca-kaca pecah hingga radius beberapa kilometer. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, termasuk gedung sekolah dan pusat-pusat komunitas. Pemerintah Nigeria menetapkan status darurat di wilayah yang terdampak oleh bencana itu dan mengerahkan tentara serta petugas medis untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban.